

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Setelah melakukan penelitian atas permasalahan yang diangkat, peneliti mencoba untuk memberikan kesimpulan akhir atas hasil penelitian. Dan di akhir akan dirumuskan secara singkat saran atau masukan untuk perbaikan demi kualitas berita yang lebih baik.

#### **A. Kesimpulan**

Media massa sebagai pilar ke empat demokrasi Pancasila (Abidin, 2008:2) memiliki kewajiban untuk memenuhi hak publik mendapatkan informasi. Salah satunya adalah informasi seputar studi banding kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke luar negeri. Anggota DPR adalah perwakilan rakyat di legislatif dan memiliki tanggung jawab kepada rakyat sehingga tak mengherankan apabila setiap tindak tanduk anggota DPR menjadi berita yang menarik bagi seorang yang bekerja di media.

Dalam pemberitaannya, media harus memperhatikan kualitas pemberitaan. Media hendaknya berfungsi maksimal, tidak memihak, objektif, dan berimbang dalam pemberitaan. Meskipun demikian proses seleksi yang terjadi hingga menghasilkan sebuah teks berita tetap akan memunculkan kecenderungan-kecenderungan yang tampak dari teks berita itu sendiri. Kecenderungan sikap media terlihat dalam *balance* dan *neutrality* dalam pemberitaan studi banding kunjungan kerja DPR ke luar negeri tahun 2011.

Analisis kecenderungan sikap media yang digunakan dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana harian nasional Media Indonesia, Kompas, dan

Tempo masih belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan baik. Hal tersebut terlihat dari kecenderungan aspek ketidakseimbangan porsi alinea, tampak jelas bahwa adanya bias yang tinggi akan kecenderungan untuk menghadirkan pihak-pihak secara tidak seimbang dan masih adanya *slant* berupa kritikan terhadap kinerja anggota DPR. Selain itu netralitas pemberitaan juga terlihat bias yang tinggi dalam penggunaan aspek dramatisasi dan penonjolan emosi.

Ketiga media memiliki porsi kecenderungan yang berbeda-beda Media Indonesia terlihat menonjol dalam menampilkan kecenderungan kontra. Hal tersebut terlihat dari tingginya bias porsi ketidakseimbangan sebesar 70%. Media Indonesia lebih banyak menampilkan pemberitaan satu sisi dibandingkan media yang lain, serta memberikan porsi pemberitaan yang lebih kepada pihak yang kontra terhadap sikap dan kebijakan studi banding kunjungan kerja DPR ke luar negeri.

Sedangkan dalam aspek netralitas, harian Media Indonesia terlihat dari tingginya sensasionalisme pemberitaan. Penggunaan istilah yang mendramatisir keadaan sebanyak 64,71% serta penonjolan emosi masih tinggi sebanyak 47,06% ditemukan dalam media ini. Selain itu, dalam media ini juga masih ditemukan adanya stereotipe, *juxtaposition*, dan *linkage* dibandingkan Kompas dan Tempo. Besar persentase ketiganya mencapai 17,65%,

Koran Tempo memiliki *slant* dan porsi ketidakberimbangan pemberitaan dengan persentase yang tinggi dibandingkan Media Indonesia. Persentase adanya *sourcr bias* sebesar 20%, *slant* sebanyak 60%, dan representasi pro-kontra sebanyak 80%. Hasil penelitian menunjukkan Tempo memiliki kecederungan

yang sama dalam menghadirkan porsi yang lebih banyak kepada narasumber yang tidak setuju dengan adanya studi banding kunjungan ke luar negeri. Bila dilihat dari aspek netralitas, koran Tempo banyak menggunakan kalimat yang mengandung sensasionalisme dan emosional. Persentase adanya sensasionalisme pemberitaan melalui penonjolan emosi sebanyak 20% , dramatisasi sebanyak 40%, dan *juxtaposition* sebanyak 20%. Meski demikian jumlah berita yang disajikan Tempo tidak lebih banyak dibandingkan Media Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan porsi perhatian yang lebih banyak diberikan oleh Media Indonesia dibandingkan Tempo.

Harian Kompas adalah media yang lebih cenderung mendekati *balance* dan netralitas dibandingkan media yang lain. Harian Kompas memiliki persentase *source bias* 12.50%, *slant* 37.50%, keseimbangan representasi pro-kontra sebanyak 50%. Dalam aspek netralitas terlihat adanya penonjolan emosi, dramatisasi dan stereotipe meskipun tidak lebih banyak dibandingkan Media Indonesia dan Tempo. Persentase ketiga sub dimensi sebesar 12.50%.

## **B. Saran**

### **1. Bagi media**

Dalam pemberitaan hendaknya tetap mempertimbangkan aspek *balance* dan *neutrality*. Hal tersebut nantinya akan dinilai oleh masyarakat yang pada akhirnya akan lebih selektif memilih berita berdasarkan kualitas. Dengan demikian hasil penelitian ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi media untuk menjadi lebih baik sehingga mampu menjalankan peranannya sebagai pilar keempat demokrasi Pancasila terlebih dalam pemberitaan terhadap dewan perwakilan rakyat.

2. Bagi pengguna media

Dapat melihat kualitas media dalam pemberitaan sehingga nantinya menjadi lebih kritis dalam melihat pemberitaan media terlebih pemberitaan yang terkait oleh wakil rakyat di tingkat legislatif.

3. Bagi penelitian yang akan datang

Keterbatasan metode penelitian membuat peneliti tidak bisa mengetahui alasan kecenderungan yang terjadi di dalam media. Dibutuhkan metode dan penelitian yang lebih sesuai untuk menjawab kendala yang ada.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Wikrama Iryans. 2008. *Buku Panduan tentang Hubungan Media dan Ketrampilan Berkomunikasi*. Sekretariat Jenderal DPR RI: Jakarta.
- Keller, Anett. 2009. *Tantangan dari Dalam, Otonomi Redaksi di Media Cetak Nasional Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*: Friedrich Ebert Stiftung: Jakarta.
- Krippendorff, Klaus, 1993. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*: PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Mallarangeng, Rizal. 2010. *Pers Orde Baru: Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*. PT. Gramedia: Jakarta
- McQuail, Denis. 1992. *Media Performance: News Reporting and Writing*. New York: McGraw-Hill.
- Prasodjo, Eko. 2008. *Buku Panduan tentang Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen*. Sekretariat Jenderal DPR RI: Jakarta.
- Rahayu. 2006. *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar Di Indonesia*: Krayon Grafika. Jakarta.
- Siregar, Ashadi,dkk. 1998 *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*: Kanisius. Yogyakarta.
- Siregar, Ashadi. 2006. *Etika Komunikasi*. Penerbit Pustaka. Yogyakarta.
- Tim LSPP. 2005. *Media Sadar Publik: Media Lokal Mewarakan Korupsi dan Pelayanan Publik*: LSPP. Jakarta.
- Wahid, 2008. Hasanuddin. *Sistem Pelaporan Kegiatan anggota DPR RI*. Sekretariat Jenderal DPR RI. Jakarta.
- Yanuarti, Sri, dkk. 1997. *Tentang Nepotisme: Analisis Isi Media Massa*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi

### Jurnal

- Prakoso, Junarto Imam. 1999. "Sikap Netralitas Pers terhadap Pemerintahan Habibie (Analisis Isi terhadap "Kompas" dan "Republika")" *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Menuju Paradigma Baru Penelitian Komunikasi*, Vol.III, April. hal.109-126.

### Skripsi tidak dipublikasikan

- Hastungkoro, Willibordus Tatag. *KONFLIK JALUR GAZA (Studi Analisis Isi Media Performance Pemberitaan Pertempuran di Jalur Gaza antara Tentara Israel dan Hamas dalam Harian Republika periode 28 Desember 2008 - 22 Januari 2009)*: Univeritas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Nurina, Yosephine Tammy. 2009. *Perang Israel-Palestina (Studi analisis isi obyektivitas pemberitaan Perang Israel- Palestina pada SKH KOMPAS dan SKH REPUBLIKA periode 13-18 Januari 2009)* :Univeritas Atma Jaya Yogyakarta.

Puspitasari, M. Risa. 2009. *Profiling DPR dan KPK pada MBM Tempo (Studi Analisis Framing Profiling DPR dan KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di DPR oleh KPK pada Pemberitaan Majalah Tempo Periode April 2008-Agustus 2008)* :Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

**Artikel**

Kompas. *DPR Habiskan Dana RP 15 Miliar*. halaman 2. 5 Mei 2011.

Kompas. *Kunjungan Kerja Perlu Dikaji Ulang*. halaman 2. 6 Mei 2011

Kompas. *Anggota DPR Tak Mau Mendengar*.halaman 2. 7 Mei 2011

Kompas. *Perilaku DPR yang Memalukan*. halaman 2. 7 Mei 2011

**Artikel dari Internet**

2009. “Media Indonesia;Sejarah Singkat” dalam *mediaindonesia.com*  
diakses 7 November 2011 pukul 12.39 WIB.

([http://www.mediaindonesia.com/read/2009/02/23/38398/11/11/Sejarah Singkat](http://www.mediaindonesia.com/read/2009/02/23/38398/11/11/Sejarah_Singkat))

<http://dewanpers.or.id/data/perusahaan-pers?view=search&layout=search>

diakses 7 November 2011 pukul 01.23 WIB.

**LAMPIRAN 1**  
*Coding Sheet*  
**Analisis Isi Kecenderungan Sikap Media**  
**Pemberitaan Studi Banding Kunjungan Kerja DPR ke Luar Negeri**  
**Surat Kabar Harian Media Indonesia, Kompas dan Tempo**  
**periode April 2011 hingga Mei 2011**

Instruksi 1 : *Isilah data-data di bawah ini dengan huruf balok !*

Surat Kabar Harian : MEDIA INDONESIA / KOMPAS / TEMPO  
 Judul Berita : \_\_\_\_\_  
 Tanggal Terbit : \_\_\_\_\_  
 Nama Pengkoding : \_\_\_\_\_

Instruksi 2 : Pada bagian ini Anda dimohon untuk memberikan respon atas setiap pernyataan dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan yang telah disediakan. Berikan satu jawaban saja di setiap pernyataan.

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Terdapat kecenderungan nada berita yang hanya mengangkat komentar dari satu sisi saja		
2.	Terdapat pujian yang memberikan gambaran positif ataupun negatif/kritikan seputar berita yang merupakan opini wartawan		
3.	Terdapat porsi alinea berita yang seimbang mengenai dihadapkannya pendapat pro-kontra dalam teks berita		
4.	Terdapat tokoh yang didominankan dan paling berpengaruh daripada tokoh lainnya dalam teks berita		
5.	Terjadi penonjolan aspek emosional-suka,benci, marah, sedih, gembira, ataupun opini penulis		
6.	Terjadi dramatisasi atau penulisan berita yang hiperbolik dan melebih-lebihkan suatu fakta (sangat, luar biasa) untuk memberi kesan dramatis		
7.	Terjadi penggunaan atribut kata tertentu yang berasosiasi pada tokoh atau kelompok dalam berita		
8.	Wartawan menyajikan dua hal yang tidak sebanding untuk menghasilkan kesan dramatis dalam berita		
9.	Wartawan membandingkan dua hal yang tidak berhubungan untuk menimbulkan efek sebab-akibat dalam berita		

Dimensi	Unit Analisis	Kategorisasi	Pernyataan
Keseimbangan (Balance)	a. Source Bias	Adanya representasi satu sisi dalam pemberitaan	1
	b. Slant	Kritikan pujian atau kritikan berupa opini wartawan	2
	c. Representasi pro-kontra	Keseimbangan porsi alinea dalam representasi pro-kontra	3
Netralitas (Neutrality)	a. Sensasionalisme	a. Personalisasi tokoh	4
		b. Aspek emosional	5
		c. Dramatisasi	6
	b. Stereotype	Penggunaan asosiasi kata	7
	c. <i>Juxtaposition</i>	Pembandingan dua hal yang tidak sebanding	8
	d. <i>Linkage</i>	Membandingkan dua hal yang tidak relevan	9

### 1. Unit Analisis Source Bias

No	Kode Berita	Adanya representasi satu sisi dalam pemberitaan	
		Ya	Tidak
1.	M1		✓
2.	M2		✓
3.	M3	✓	
4.	M4	✓	
5.	M6		✓
6.	M7	✓	
7.	M8		✓
8.	M9	✓	
9.	M10		✓
10.	M11		✓
11.	M12		✓
12.	M14		✓
13.	M15	✓	
14.	M16		✓
15.	M17		✓
16.	M18		✓

17.	M19		✓
18.	K1		✓
19.	K2		✓
20.	K3		✓
21.	K4		✓
22.	K5	✓	
23.	K6		✓
24.	K7		✓
25.	K8		✓
26.	T1		✓
27.	T2		✓
28.	T3	✓	
29.	T4		✓
30.	T5		✓

Adanya *source bias* pada harian Media Indonesia:

$$\frac{5}{17} \times 100\% = 29,41\%$$

Tidak ada *source bias* pada harian Media Indonesia:

$$\frac{12}{17} \times 100\% = 70,59\%$$

Adanya *source bias* pada harian Kompas:

$$\frac{1}{8} \times 100\% = 12,50\%$$

Tidak ada *source bias* pada harian Kompas:

$$\frac{7}{8} \times 100\% = 87,50\%$$

Adanya *source bias* pada harian Tempo:

$$\frac{1}{5} \times 100\% = 20,00\%$$

Tidak ada *source bias* pada harian Tempo:

$$\frac{4}{5} \times 100\% = 80,00\%$$

Source Bias	Media Indonesia		Kompas		Tempo	
	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%
Ya	5	29,41	1	12,50	1	20,00
Tidak	12	70,59	7	87,50	4	80,00
Jumlah	17	100	8	100	5	100

## 2. Unit analisis *Slant*

No	Kode Berita	Adanya <i>slant</i>	
		Ya	Tidak
1.	M1		✓
2.	M2		✓
3.	M3		✓
4.	M4	✓	
5.	M6		✓
6.	M7	✓	
7.	M8		✓
8.	M9	✓	
9.	M10		✓
10.	M11	✓	
11.	M12		✓
12.	M14		✓
13.	M15	✓	
14.	M16		✓
15.	M17		✓
16.	M18		✓
17.	M19		✓
18.	K1	✓	
19.	K2		✓
20.	K3		✓
21.	K4		✓
22.	K5		✓
23.	K6		✓
24.	K7	✓	
25.	K8	✓	
26.	T1		✓
27.	T2	✓	
28.	T3		✓
29.	T4	✓	
30.	T5	✓	

Adanya *slant* pada harian Media Indonesia:

$$\frac{5}{17} \times 100\% = 29,41\%$$

Tidak ada *slant* pada harian Media Indonesia:

$$\frac{12}{17} \times 100\% = 70,59\%$$

Adanya *slant* pada harian Kompas:

$$\frac{3}{8} \times 100\% = 37,50\%$$

Tidak ada *slant* pada harian Kompas:

$$\frac{5}{8} \times 100\% = 62,50\%$$

Adanya *slant* pada harian Tempo:

$$\frac{3}{5} \times 100\% = 60,00\%$$

Tidak ada *slant* pada harian Tempo:

$$\frac{2}{5} \times 100\% = 40,00\%$$

Slant	Media Indonesia		Kompas		Tempo	
	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%
Ya	5	29,41	3	37,50	3	60,00
Tidak	12	70,59	5	62,50	2	40,00
Jumlah	17	100	8	100	5	100

### 3. Unit Analisis Representasi Pro-Kontra

No	Kode Berita	Adanya representasi representasi pro-kontra	
		Ya	Tidak
1.	M1		✓
2.	M2	✓	
3.	M3		✓
4.	M4		✓
5.	M6		✓
6.	M7		✓
7.	M8	✓	
8.	M9		✓
9.	M10		✓
10.	M11		✓
11.	M12		✓
12.	M14		✓
13.	M15		✓

14.	M16	✓	
15.	M17	✓	
16.	M18	✓	
17.	M19		✓
18.	K1	✓	
19.	K2		✓
20.	K3		✓
21.	K4	✓	
22.	K5		✓
23.	K6		✓
24.	K7	✓	
25.	K8	✓	
26.	T1		✓
27.	T2	✓	
28.	T3		✓
29.	T4		✓
30.	T5		✓

Adanya representasi pro-kontra pada harian Media Indonesia:

$$\frac{5}{17} \times 100\% = 29,41\%$$

Tidak ada representasi pro-kontra pada harian Media Indonesia:

$$\frac{12}{17} \times 100\% = 70,59\%$$

Adanya representasi pro-kontra pada harian Kompas:

$$\frac{4}{8} \times 100\% = 50,00\%$$

Tidak ada representasi pro-kontra pada harian Kompas:

$$\frac{4}{8} \times 100\% = 50,00\%$$

Adanya representasi pro-kontra pada harian Tempo:

$$\frac{1}{5} \times 100\% = 20,00\%$$

Tidak ada representasi pro-kontra pada harian Tempo:

$$\frac{4}{5} \times 100\% = 80,00\%$$

Representasi pro-kontra	Media Indonesia		Kompas		Tempo	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%

	Berita		Berita		Berita	
Ya	5	29,41	4	50,00	1	20,00
Tidak	12	70,59	4	50,00	4	80,00
Jumlah	17	100	8	100	5	100

#### 4. Sub Unit Analisis Personalisasi Tokoh

No	Kode Berita	Adanya Personalisasi Tokoh	
		Ya	Tidak
1.	M1		✓
2.	M2		✓
3.	M3		✓
4.	M4		✓
5.	M6		✓
6.	M7	✓	
7.	M8		✓
8.	M9		✓
9.	M10	✓	
10.	M11		✓
11.	M12	✓	
12.	M14		✓
13.	M15		✓
14.	M16		✓
15.	M17		✓
16.	M18		✓
17.	M19		✓
18.	K1		✓
19.	K2		✓
20.	K3		✓
21.	K4		✓
22.	K5		✓
23.	K6		✓
24.	K7		✓
25.	K8		✓
26.	T1		✓
27.	T2		✓
28.	T3		✓
29.	T4		✓
30.	T5		✓

Adanya personalisasi tokoh pada harian Media Indonesia:

$$\frac{3}{17} \times 100\% = 17,65\%$$

Tidak ada personalisasi tokoh pada harian Media Indonesia:

$$\frac{14}{17} \times 100\% = 82,35\%$$

Adanya personalisasi tokoh pada harian Kompas:

$$\frac{0}{8} \times 100\% = 0\%$$

Tidak ada personalisasi tokoh pada harian Kompas:

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Adanya personalisasi tokoh pada harian Tempo:

$$\frac{0}{5} \times 100\% = 0\%$$

Tidak ada personalisasi tokoh pada harian Tempo:

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Personalisasi	Media Indonesia		Kompas		Tempo	
	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%
Ya	3	17,65	0	0,00	0	0,00
Tidak	14	82,35	8	100,00	5	100,00
Jumlah	17	100	8	100	5	100

### 5. Sub Unit Analisis Penonjolan Emosi

No	Kode Berita	Adanya Penonjolan Emosi	
		Ya	Tidak
1.	M1		✓
2.	M2		✓
3.	M3	✓	
4.	M4	✓	
5.	M6	✓	
6.	M7	✓	
7.	M8		✓
8.	M9	✓	
9.	M10	✓	
10.	M11	✓	

11.	M12		✓
12.	M14		✓
13.	M15	✓	
14.	M16		✓
15.	M17		✓
16.	M18		✓
17.	M19		✓
18.	K1		✓
19.	K2		✓
20.	K3		✓
21.	K4		✓
22.	K5		✓
23.	K6		✓
24.	K7		✓
25.	K8	✓	
26.	T1	✓	
27.	T2		✓
28.	T3		✓
29.	T4		✓
30.	T5		✓

Adanya penonjolan emosi pada harian Media Indonesia:

$$\frac{8}{17} \times 100\% = 47,06\%$$

Tidak ada penonjolan emosi pada harian Media Indonesia:

$$\frac{9}{17} \times 100\% = 52,94\%$$

Adanya penonjolan emosi pada harian Kompas:

$$\frac{1}{8} \times 100\% = 12,50\%$$

Tidak ada penonjolan emosi pada harian Kompas:

$$\frac{7}{8} \times 100\% = 87,50\%$$

Adanya penonjolan emosi pada harian Tempo:

$$\frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

Tidak ada penonjolan emosi pada harian Tempo:

$$\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

Penonjolan Emosi	Media Indonesia		Kompas		Tempo	
	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%
Ya	8	47,06	1	12,50	1	20,00
Tidak	9	52,94	7	87,50	4	80,00
Jumlah	17	100	8	100	5	100

## 6. Sub Unit Analisis Dramatisasi

No	Kode Berita	Adanya Dramatisasi	
		Ya	Tidak
1.	M1	✓	
2.	M2	✓	
3.	M3	✓	
4.	M4	✓	
5.	M6	✓	
6.	M7	✓	
7.	M8	✓	
8.	M9		✓
9.	M10	✓	
10.	M11	✓	
11.	M12		✓
12.	M14	✓	
13.	M15	✓	
14.	M16		✓
15.	M17		✓
16.	M18		✓
17.	M19		✓
18.	K1		✓
19.	K2		✓
20.	K3		✓
21.	K4		✓
22.	K5		✓
23.	K6		✓
24.	K7		✓
25.	K8		✓
26.	T1	✓	
27.	T2	✓	
28.	T3		✓
29.	T4		✓
30.	T5		✓

Adanya dramatisasi pada harian Media Indonesia:

$$\frac{11}{17} \times 100\% = 64,71\%$$

Tidak ada dramatisasi pada harian Media Indonesia:

$$\frac{6}{17} \times 100\% = 35,29\%$$

Adanya dramatisasi pada harian Kompas:

$$\frac{1}{8} \times 100\% = 12,50\%$$

Tidak ada dramatisasi pada harian Kompas:

$$\frac{7}{8} \times 100\% = 87,50\%$$

Adanya dramatisasi pada harian Tempo:

$$\frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

Tidak ada dramatisasi pada harian Tempo:

$$\frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

Dramatisasi	Media Indonesia		Kompas		Tempo	
	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%
Ya	11	64,71	1	12,50	2	40,00
Tidak	6	35,29	7	87,50	3	60,00
Jumlah	17	100	8	100	5	100

## 7. Unit Analisis Stereotipe

No	Kode Berita	Adanya Stereotipe	
		Ya	Tidak
1.	M1		✓
2.	M2		✓
3.	M3		✓
4.	M4	✓	
5.	M6	✓	
6.	M7		✓
7.	M8		✓
8.	M9		✓
9.	M10		✓

10.	M11		✓
11.	M12		✓
12.	M14		✓
13.	M15		✓
14.	M16		✓
15.	M17		✓
16.	M18		✓
17.	M19		✓
18.	K1		✓
19.	K2		✓
20.	K3		✓
21.	K4		✓
22.	K5		✓
23.	K6		✓
24.	K7		✓
25.	K8	✓	
26.	T1		✓
27.	T2		✓
28.	T3		✓
29.	T4		✓
30.	T5		✓

Adanya stereotipe pada harian Media Indonesia:

$$\frac{2}{17} \times 100\% = 11,76\%$$

Tidak ada stereotipe pada harian Media Indonesia:

$$\frac{15}{17} \times 100\% = 88,24\%$$

Adanya stereotipe pada harian Kompas:

$$\frac{1}{8} \times 100\% = 12,50\%$$

Tidak ada stereotipe pada harian Kompas:

$$\frac{7}{8} \times 100\% = 87,50\%$$

Adanya stereotipe pada harian Tempo:

$$\frac{0}{5} \times 100\% = 0\%$$

Tidak ada stereotipe pada harian Tempo:

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Stereotype	Media Indonesia		Kompas		Tempo	
	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%
Ya	2	11,76	1	12,50	0	0,00
Tidak	15	88,24	7	87,50	5	100,00
Jumlah	17	100	8	100	5	100

### 8. Unit Analisis Juxtaposition

No	Kode Berita	Adanya Juxtaposition	
		Ya	Tidak
1.	M1		✓
2.	M2		✓
3.	M3		✓
4.	M4		✓
5.	M6		✓
6.	M7		✓
7.	M8		✓
8.	M9		✓
9.	M10		✓
10.	M11		✓
11.	M12	✓	
12.	M14	✓	
13.	M15		✓
14.	M16		✓
15.	M17		✓
16.	M18		✓
17.	M19		✓
18.	K1		✓
19.	K2		✓
20.	K3		✓
21.	K4		✓
22.	K5		✓
23.	K6		✓
24.	K7		✓
25.	K8		✓
26.	T1	✓	
27.	T2		✓
28.	T3		✓
29.	T4		✓

30.	T5		✓
-----	----	--	---

Adanya *juxtaposition* pada harian Media Indonesia:

$$\frac{2}{17} \times 100\% = 11,76\%$$

Tidak ada *juxtaposition* pada harian Media Indonesia:

$$\frac{15}{17} \times 100\% = 88,24\%$$

Adanya *juxtaposition* pada harian Kompas:

$$\frac{0}{8} \times 100\% = 0\%$$

Tidak ada *juxtaposition* pada harian Kompas:

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Adanya *juxtaposition* pada harian Tempo:

$$\frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

Tidak ada *juxtaposition* pada harian Tempo:

$$\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

<i>Juxtaposition</i>	Media Indonesia		Kompas		Tempo	
	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%
Ya	2	11,76	0	0,00	1	20,00
Tidak	15	88,24	8	100,00	4	80,00
Jumlah	17	100	8	100	5	100

### 9. Unit Analisis *Linkage*

No	Kode Berita	Adanya <i>Linkage</i>	
		Ya	Tidak
1.	M1		✓
2.	M2		✓
3.	M3		✓
4.	M4		✓
5.	M6	✓	
6.	M7		✓
7.	M8		✓
8.	M9		✓

9.	M10		✓
10.	M11		✓
11.	M12	✓	
12.	M14		✓
13.	M15		✓
14.	M16		✓
15.	M17		✓
16.	M18		✓
17.	M19		✓
18.	K1		✓
19.	K2		✓
20.	K3		✓
21.	K4		✓
22.	K5		✓
23.	K6		✓
24.	K7		✓
25.	K8		✓
26.	T1		✓
27.	T2		✓
28.	T3		✓
29.	T4		✓
30.	T5		✓

Adanya *linkage* pada harian Media Indonesia:

$$\frac{2}{17} \times 100\% = 11,76\%$$

Tidak ada *juxtaposition* pada harian Media Indonesia:

$$\frac{15}{17} \times 100\% = 88,24\%$$

Adanya *juxtaposition* pada harian Kompas:

$$\frac{0}{8} \times 100\% = 0\%$$

Tidak ada *juxtaposition* pada harian Kompas:

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

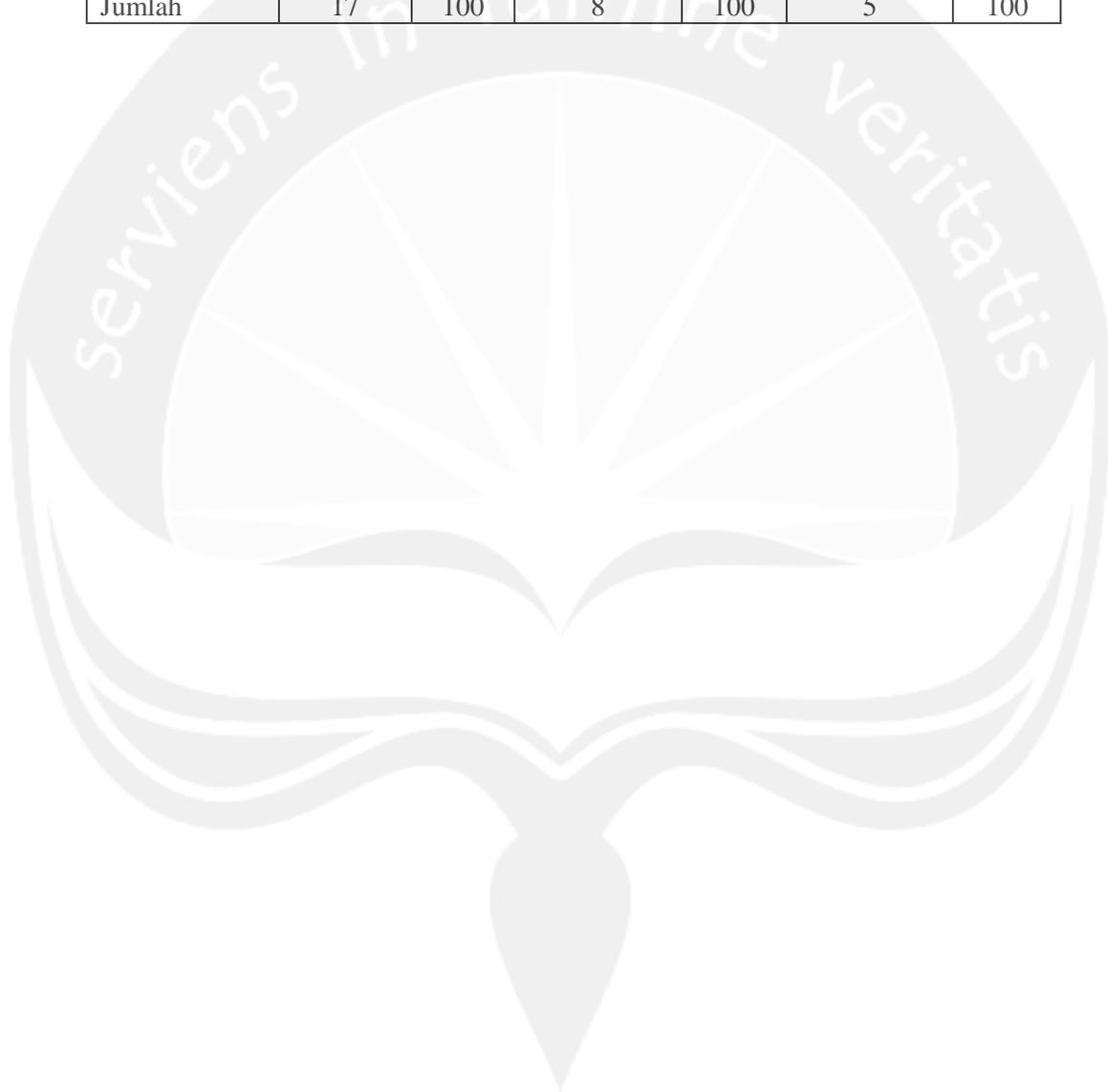
Adanya *juxtaposition* pada harian Tempo:

$$\frac{0}{5} \times 100\% = 0\%$$

Tidak ada *juxtaposition* pada harian Tempo:

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

<i>Linkage</i>	Media Indonesia		Kompas		Tempo	
	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%	Jumlah Berita	%
Ya	2	11,76	0	0,00	0	0,00
Tidak	15	88,24	8	100,00	5	100,00
Jumlah	17	100	8	100	5	100



## LAMPIRAN 2

### Perhitungan *Coefficient Reliability*

No.	Sub Unit Analisis	M1	M2	CR 1	CR 2
1	Adanya source bias	25	27	0,83	0,90
2	Adanya slant	26	27	0,87	0,90
3	Adanya keseimbangan representasi pro-kontra	25	26	0,83	0,87
4	Adanya personalisasi tokoh	27	28	0,90	0,93
5	Adanya aspek emosional wartawan	25	27	0,83	0,90
6	Adanya dramatisasi	25	26	0,83	0,87
7	Adanya stereotipe	27	28	0,90	0,93
8	Adanya juxtaposition	22	26	0,73	0,87
9	Adanya linkages	25	25	0,83	0,83

## Pelesiran DPR di Masa Reses Rp 12 Miliar

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat disinyalir menghabiskan dana Rp 12 miliar untuk studi banding selama masa reses. Tiga komisi di parlemen dan Badan Urusan Rumah Tangga diduga menggunakan dana itu untuk kunjungan ke empat benua.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan 50 legislator bakal jalan-jalan ke empat benua dalam rentang waktu kurang dari sebulan. "Hanya dengan waktu satu bulan, anggota DPR menghabiskan pajak publik sebesar Rp 12 miliar," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, dalam siaran persnya kemarin. "Cuma Benua Afrika saja yang tak mereka kunjungi."

Menurut dia, Fitra mencatat 11 anggota Komisi I, yang membidangi pertahanan dan keamanan, berkunjung ke Turki, Rusia, Prancis, Spanyol, dan Amerika Serikat. Pelesiran itu menghabiskan dana sekitar Rp 5,6 miliar. Fitra juga mencatat 13 legislator Komisi X pergi ke Spanyol dan Cina, yang menghabiskan dana Rp 1,9 miliar. Selain itu, 13 anggota Komisi VIII pergi ke Cina dan Australia dengan dana Rp 1,4 miliar. Fitra juga mencatat Badan Urusan Rumah Tangga DPR melawat ke Inggris dan Amerika Serikat dengan dana Rp 3,5 miliar.

Fitra menilai, anggaran Rp 12 miliar itu sebetulnya bisa dipakai untuk 276 anak sekolah yang tidak mampu sekolah.

Adapun Ketua Komisi X DPR Mahyuddin berkukuh bahwa studi banding ke luar negeri tetap diperlukan. "Kami kan harus memperluas wawasan," ujar dia saat dimintai konfirmasi kemarin.

Lagi pula, dia melanjutkan, setiap anggota Dewan diprogramkan untuk ikut dalam satu kunjungan studi banding ke luar negeri per tahun.

# Ramai-Ramai Membela Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

MAYORITAS fraksi di DPR ramai-ramai memberi pembenaran terhadap kunjungan kerja atau studi banding anggota DPR, termasuk untuk bepergian ke luar negeri.

Ketua DPR Marzuki Alie pun terkesan lepas tangan melihat maraknya perjalanan anggota dewan ke luar negeri. Ia mengaku telah mengimbau agar mengurangi agenda kunjungan ke luar negeri.

Namun, lanjut dia, imbauan itu kerap diabaikan. "Ketua DPR tidak punya otoritas untuk (melarang ke luar negeri) itu," kata Marzuki di Jakarta, Jumat (15/4).

Bahkan, ia menunjuk Wakil Ketua DPR dari F-PG Priyo Budi Santoso sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. "Kalau mengenai kunjungan luar negeri, silakan tanya ke Pak Priyo. Dia yang *ngurus* hal itu," tegasnya.

Menurut dia, posisi fraksi memiliki peran lebih besar dalam membatasi kegiatan ke luar negeri. Fraksi berhak untuk mengizinkan atau melarang anggota mereka untuk ikut kunjungan luar negeri.

Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR dari F-PG Nudirman Munir bahkan mengistilahkan kunjungan

giatan wajib. Kepergian ke luar negeri merupakan hal yang sangat penting untuk bisa menyerap kondisi nyata di tempat yang dikunjungi.

"Kalau kunjungan kerja dilarang, saya tidak tahu lagi. Ya 5D (datang, duduk, diam, dengar, duit) saja. Kunjungan kerja itu wajib," kata Nudirman.

Ketua Komisi I DPR dari F-PKS Mahfudz Siddiq juga mengangap kegiatan kunjungan kerja anggota dewan penting. Ia mencontohkan kunjungan Komisi I DPR ke luar negeri. "Tentang industri pertahanan juga menggali masukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen ke berbagai negara. Menggali masukan kebijakan politik untuk beberapa isu," jelas Mahfudz.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari F-PD Hayono Isman mengaku memimpin rombongan anggota Komisi I DPR ke Amerika Serikat (AS) pada 6 Mei. Ia menjelaskan kunjungan itu antara lain membawa misi melobi parlemen dan pemerintah AS untuk mencabut status cecak atas nama Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

"Salah satu agenda meminta pihak AS segera mencabut pencelakaan pada Wakil, Menhan. Tuduhan kejahatan pelanggaran.



MISUSANTO

**Ketua DPR tidak punya otoritas untuk (melarang ke luar negeri) itu."**

**Marzuki Alie**  
Ketua DPR

terjadi dan tidak ada vonis dari pengadilan," kata Hayono.

Ia mengakui DPR kerap kurang transparan dalam menjelaskan hasil kunjungan kerja ke luar negeri. "Semestinya memang sebelum kami berangkat, publik harusnya diberi tahu. Jangan sampai kunjungan kerja dilaporkan hanya setelahnya. Seharusnya ada di laman. Saya minta maaf belum sampai berpikir begitu sebelumnya," ujarnya.

Ketua F-PDIP DPR Tjahjo Kumolo menjelaskan F-PDIP cukup selektif dalam memberikan izin anggota fraksi untuk mengikuti kunjungan kerja

tanyakan langsung kepada anggota fraksi mengenai detail maksud dan tujuan kunjungan tersebut," ujarnya.

Edhy Prabowo dari F-Gerindra DPR mengakui DPP Gerindra belum mengizinkan kunjungan luar negeri bagi anggota mereka. Fraksi Gerindra secara resmi telah menyampaikan surat resmi ke komisi yang mengadakan kunjungan untuk memastikan ketidakitertarikan mereka.

"Surat yang kami kirim dengan nomor A.471/F.P-GERINDRA/DPR-RI/III/2011 jelas melarang anggota Fraksi Gerindra untuk berkunjung ke luar negeri. Alasannya kondisi ekonomi saat ini masih tidak kondusif," ujarnya.

Studi banding bagi Fraksi Gerindra hanya diperuntukkan hal-hal yang sangat mendesak dan penting. Misalnya, studi banding Komisi VIII soal haji atau kunjungan luar negeri terkait dengan masalah aktual yang dihadapi Indonesia saat ini seperti perompak Somalia yang menahang warga negara Indonesia.

"Itu kan hal penting yang harus diselesaikan anggota komisi karena sifatnya urgen. Komisi I bisa ke Somalia untuk mengatasi hal tersebut," tan-

# Studi Banding DPR tidak Layak Dimaatkan

Anggota DPR sudah kehilangan rasa malu dan tanggung jawab saat meninggalkan pemilihan mereka di daerah.

AKHMAD MUSTAIN

**M**ESKI menyan-  
dang nama De-  
wan Perwakilan  
Rakyat (DPR),  
ternyata tidak semua anggota  
dewan menggunakan masa re-  
ses mereka untuk menjunjung  
para pemimpin mereka. Beberapa  
di antaranya memilih pelesiran  
berkedok studi banding ke luar  
negeri, di saat rekan-rekan se-  
jawat mereka tengah menjaring  
aspirasi masyarakat.

presentasinya. Kalau rasa tang-  
gung jawab itu sudah hilang,  
tentu rasa malunya juga sudah  
hilang, "jelas Iberamsjah dalam  
perbincangan dengan *Media*  
*Indonesia*, kemarin.

La mengatakan hal yang  
dilakukan DPR kali ini sudah  
tidak layak mendapatkan maaf  
dari publik. Pasalnya para ang-  
gota dewan itu telah mengaba-  
kan tugas dan fungsi utama  
mereka sebagai wakil rakyat,  
yakni fungsi representatif.

"Ini menyangkut moral dan  
tanggung jawab. Moralnya tips  
dan malunya tips. Mereka su-  
dah kehilangan rasa tanggung  
jawab. Apa pun pekerjaannya,  
baik tukang sapu atau presi-  
den, yang utama adalah rasa  
tanggung jawabnya. Namun,  
DPR ini, mereka tidak punya  
muka," tegas Iberamsjah.

Terlebih, sambungnya, dari  
segi substansi, studi banding  
tidak pernah ada hasilnya,  
dan lebih sepadan bagi-bagi  
jatah giliran ke luar negeri. "Itu  
jalah gilirannya ke luar negeri.  
"Rasa tanggung jawab dan  
moral mereka sudah tidak ada  
dalam menjalankan tugas re-

yang melakukan studi banding,  
itu semakin memperlihatkan  
tugas mereka tidaklah efektif,"  
terangnya.

## Tidak transparan

Dalam menyikapinya sikap ang-  
gota dewan yang keras kepala  
seperti itu, Ketua Divisi Ad-  
vokasi Pusat Studi Hukum  
dan Kebijakan (PSHK) Ronald  
Rohandi menilai DPR yang  
tak memiliki niat membenahi  
aturan internalnya. Apalagi,  
tidak ada keterkaitan signifi-  
kan antara studi banding yang  
dilakukan dewan dan produk-  
tivitas serta kualitas legislasi.

"Setiap alat kenegaraan  
DPR mengusulkan perlu studi  
banding. Namun, di saat yang  
sama, DPR dihadapkan pada  
kegagalan sistematis dalam  
mengolah berbagai hasil studi  
banding, terkait dengan sub-  
stansi regulasi yang sedang  
dibahas," jelasnya.

Buruknya perilaku anggota  
dewan seperti itu, sambung-  
nya, kian diperparah kinerja  
jajanya di bidang legislasi. DPR  
selalu gagal mencapai target

jumlah legislasi di setiap tahun,  
sedangkan kegiatan stud-  
i banding justru terus berjalan  
"Padahal DPR sering m-  
ngeluhkan keterbatasan wak-  
dalam menyelesaikan tungga-  
an RUU terkait dengan tid-  
legislasi nasional. Namu  
kenapa penggunaan wak-  
lebih diprioritaskan pada stu-  
Buruknya perilaku itu s-  
banding," tanyanya.

koordinasi Forum Indonesia unti  
Sementara itu, Koordinator  
Investigasi dan Advok-  
tor Investigasi dan Advok-  
publik soal rencana, tujuan  
dan hasil studi banding yan-

dilakukan.  
Sementara itu, Koordinator  
Investigasi dan Advok-  
publik soal rencana, tujuan  
dan hasil studi banding yan-  
di daerah dan mendahului  
kunjungan ke luar negeri ac-  
lah bentuk perampokan DI  
terhadap uang negara. (P-2)  
mustain@medialindonesia.co

# Miliaran Rupiah Habis buat Pelesiran DPR

Spanyol dan Amerika Serikat menjadi dua negara favorit yang dikunjungi anggota dewan. Bahkan dua negara itu sampai harus dikunjungi dua kali.

ANATA SYAH FITRI

**P**ELESIRAN ke luar negeri dengan dalih kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPR pada masa reses kali ini terus berlangsung. Setelah Komisi I berangkat pada Rabu (13/4) lalu, kunjungan ke luar negeri juga dilakukan sejumlah komisi lain.

Bahkan, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang saat ini sedang uisibukkan dengan pembahasan gedung baru DPR juga seperti tak mau ketinggalan kereta.

Totalnya, di rentang waktu 14 April hingga 8 Mei mendatang, ada 11 kunjungan ke delapan negara tujuan. Setidaknya, Rp12 miliar uang rakyat dihabiskan untuk membiayai agenda DPR itu di masa reses.

Berdasarkan data yang dimiliki Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Komisi I yang paling banyak menghabiskan APBN untuk membiayai kepergian mereka ke luar negeri kali ini. Agendanya, Komisi I berkunjung ke lima negara dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp5,7 miliar, dengan negara tujuan Prancis, Spanyol, Turki, Rusia, dan Amerika Serikat (AS). Dalih para anggota Komisi I

adalah untuk pengayaan RUU Intelijen, belajar sistem politik, dan industri pertahanan.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Uchok Sky Khadafi menambahkan, selain Komisi I, Komisi X juga akan berkunjung ke Spanyol dan China dalam rangka studi banding fasilitas olahraga, perpustakaan, dan sarana pendidikan. Demikian pula dengan Komisi VIII yang akan berangkat ke China dan Australia untuk kepentingan pembahasan RUU Fakir Miskin. Adapun anggota BURT akan segera

mengemas koper untuk pergi ke Inggris dan AS.

Dari delapan negara tujuan, menurut Uchok, Spanyol dan AS menjadi negara tujuan yang paling digemari anggota dewan karena dikunjungi dua kali.

Berdasarkan perhitungannya, alokasi anggaran kunjungan ke dua negara itu paling tinggi di antara negara tujuan lainnya. Dua kali keberangkatan ke AS akan menghabiskan Rp3,3 miliar, sedangkan ke Spanyol Rp2,5 miliar.

"Hanya dalam hitungan

bulan, anggota DPR bisa mengunjungi dua negara dari dua komisi yang berbeda. Hal ini bisa menandakan anggota DPR ke luar negeri memang bukan untuk studi banding. Padahal, kalau mereka punya pikiran yang sehat, seharusnya tidak perlu ada kunjungan double dalam studi banding ini," ujar Uchok.

## Disetujui fraksi

Meski mendapat sorotan publik, toh semua fraksi tetap menyetujui kepergian anggota mereka ke luar negeri. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar mengatakan PKB membolehkan anggota fraksinya mengikuti kunjungan kerja ke luar negeri sepanjang hal itu dibutuhkan untuk kepentingan legislasi yang mendesak.

"Itu kan sudah ada programnya sejak awal. Anggarannya juga sudah disiapkan," ujar Marwan ketika dihubungi.

Sebelumnya, Fraksi PDIP menyatakan akan selektif memilah kunjungan ke luar negeri. Menurut Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo, PDIP mengizinkan kunjungan ke luar negeri bagi anggotanya bila terkait forum parlemen dunia. (P-2)

## Studi Banding ke Luar Negeri

### Komisi I

(11 orang per negara - 7 hari)

1. Amerika Serikat, 1-7 Mei 2011, anggaran	Rp1.405.548.500
2. Turki, 16-22 April 2011, anggaran	Rp879.908.000
3. Rusia, dengan anggaran	Rp1.286.713.750
4. Prancis, 14-20 April 2011, anggaran	Rp944.593.250
5. Spanyol, dengan anggaran	Rp1.201.826.500

### Komisi X

(13 orang per negara - 7 hari)

1. Spanyol, 24-30 April 2011, anggaran	Rp1.320.374.500
2. China, dengan anggaran	Rp668.730.500

### Komisi VIII

(13 orang per negara - 7 hari)

1. China, 17-24 April 2011, anggaran	Rp668.730.500
2. Australia, dengan anggaran	Rp811.800.250

### BURT DPR

(13 orang per negara - 7 hari)

1. Inggris, 1-7 Mei 2011, anggaran	Rp1.574.638.500
2. Amerika Serikat, dengan anggaran	Rp1.966.986.500

**Total biaya Rp12.730.087.250**

Sumber: Seknas Fitra diolah dari RK, DIPA DPR 2011, dan Standar Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2010

anata@mediaindonesia.com

# KBRI di Swiss Pernah Tolak Kunjungan DPR

Ketimbang menghamburkan uang untuk studi banding, DPR sebenarnya cukup mengundang pakar dari negara lain.

CHRISTINA N SIHITE

**K**EDUTAAN Besar RI di Swiss pernah menolak permintaan studi banding salah satu komisi di DPR ke Swiss. Pasalnya, permintaan studi banding itu dilakukan pada saat parlemen setempat sedang memasuki masa reses.

Duta Besar RI untuk Swiss Djoko Susilo saat dihubungi, kemarin, mengakui tidak sedikit rombongan dari Indonesia yang hendak mengunjungi negara Eropa dengan dalih studi banding justru pada saat musim panas.

Padahal, pada saat itu mayoritas warga Eropa bepergian untuk liburan panjang. "Akhirnya anggota dewan yang terhormat hanya diterima pejabat sekretariat, bukan mitra kerja yang sesuai," papar dia.

Ia mengaku pernah menolak permintaan studi banding yang diajukan oleh DPRD salah satu provinsi di Sumatra.

"Tahun lalu ada DPRD mau kunjungan ke sini. Tapi minta acara resminya hanya beberapa jam. Saya tidak mau. Saya bilang kalau mau ke sini, 70%-80% waktunya harus untuk acara resmi," imbuah anggota Komisi I DPR periode 2004-2009 itu.

Ia juga mengaku kerap direpotkan dengan banyaknya permintaan studi banding atau menghadiri konferensi.

Terkadang ada dua rombongan yang hendak mendatangi instansi sama pada hari yang berbeda.

**“**Nyatanya, waktu pertemuan resmi hanya dua hari yaitu paling lama 4 jam setiap harinya. Selebihnya *free time*.**”**

**Djoko Susilo**

Duta Besar RI untuk Swiss

Ia mencontohkan, pada pekan pertama rombongan Panitia Khusus RUU Perbankan hendak bertemu dengan asosiasi perbankan di suatu negara. Pekan berikutnya datang Panitia Khusus RUU Keuangan ingin berdialog dengan asosiasi yang sama.

"Itu merepotkan. Sebab, kedutaan kesulitan untuk menjelaskan kepada mitra kerja di negara lain soal dua rombongan itu merupakan panitia khusus yang berbeda," cetus Djoko.

Dia menyebutkan, studi banding dengan tujuan negara maju identik dengan kegiatan berwisata. Terkadang rombongan tidak malu-malu mengatakan akan lebih banyak berwisata daripada kunjungan sesungguhnya.

Dia mengungkapkan, kabar bahwa kunjungan kerja identik dengan kegiatan pelesiran bukan cerita bohong.

Umumnya satu instansi menyusun alokasi anggaran untuk tujuh hari.

"Nyatanya, waktu pertemuan resmi hanya dua hari yaitu paling lama 4 jam setiap harinya. Selebihnya *free time* (waktu

bebas) yang sering disamakan dengan kegiatan pendalaman untuk anggota. Tidak jelas yang dimaksud dengan pendalaman," ungkap Djoko.

Padahal, lanjut dia, jika hendak mempelajari situasi di negara lain, bisa dilakukan dengan mengundang tenaga ahli atau pakar.

"Mendatangkan ahli ke Indonesia untuk presentasi itu lebih efektif. Kunjungan kerja DPR itu mahal. Hitungannya untuk kunjungan lima hari saja sekitar US\$10 ribu per orang. Biasanya yang kunjungan 12-13 orang. Belum kalau ada yang ajak anak, istri, atau staf ahli. Bisa sampai 30 orang. Sedangkan kalau mengundang pakar cuma keluar US\$10 ribu," tandasnya.

**Tidak semua berguna**

Wakil Ketua DPR dari F-PDIP Pramono Anung tidak memungkiri sejumlah permintaan kegiatan studi banding ke luar negeri tidak berguna. Ia mengaku kerap tidak menyetujui permintaan ke luar negeri.

"Memang tidak semua studi banding tidak ada manfaatnya, beberapa memang diperlukan. Tetapi, untuk beberapa hal, apalagi kalau hanya berkaitan dengan penyempurnaan UU, saya termasuk yang berpandangan tidak perlu," ujarnya.

Hasrat anggota dewan untuk bepergian ke luar negeri memang cukup memprihatinkan dan membebani anggaran negara. (Far/\*/P-1)

christina@mediaindonesia.com

# DPR Meradang Dikritik Dubes

Tujuan studi banding anggota dewan ke luar negeri selama ini lebih banyak karena penjahatan.

**NURULIA JUWITA SARI**

**K**RITIK yang disampaikan Duta Besar Indonesia di Swiss Djoko Susilo mengenai studi banding anggota DPR menuai reaksi dari para politikus. Menurut Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar, sebagai mantan anggota DPR tidak sepatutnya Djoko melontarkan kritik yang demikian.

"Tidak seluruhnya pernyataan Djoko benar. Apalagi dia pernah menjadi anggota DPR RI, tidak etis mengkritik demikian. Itu keterlaluan," cetusnya di Jakarta, kemarin, menanggapi pernyataan Djoko Susilo soal banyak kunjungan kerja anggota dewan ke mancanegara tidak bermanfaat.

Hasrul meminta agar Djoko tidak berburuk sangka kepada DPR, karena pada prinsipnya studi banding dilakukan untuk melihat keistimewaan di negara lain yang bisa diterapkan di Indonesia. "Jangan berburuk sangka. Jangan menambah citra anggota DPR makin terpuruk. Kami sedang membenahi stigma yang jelek itu. Masih ada anggota yang baik dan mengabdikan kepada masyarakat," tuturnya seraya menambahkan, seharusnya pimpinan DPR memberi teguran kepada Djoko.

Di fraksinya sendiri, Hasrul mengaku izin studi banding diberikan jika ada urgensinya. Apa yang diterapkan di nega-



MI/PANCA SYURK

**TOLAK KEPERGIAN DPR:** Warga menandatangani spanduk penolakan kepergian anggota DPR ke luar negeri dalam aksi yang digelar organisasi massa Berteng Demokrasi Rakyat (Bendera) di Terminal Pasar Senen, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

ra lain, kata dia, tidak cukup untuk dikaji hanya melalui internet. "Beda dong, ibaratnya nonton bola di televisi dengan melihat langsung kan berbeda. Di lapangan ada yang tidak bisa dikover melalui TV."

Wakil DPR Priyo Budi Santoso pun ikut meradang. Ia menilai pernyataan Djoko Susilo yang menyebut 90% kunjungan anggota DPR ke luar negeri tidak bermanfaat sebagai sesuatu yang tidak pantas.

Ia justru balik mempertanyakan peran Djoko sebagai duta besar apakah sudah berman-

faat atau tidak.

"Ada apa ini, duta besar kok ngerasani kita. Kalau yang mengkritik itu masyarakat atau LSM, bisa kami terima. Nah, ini yang mengkritik adalah seorang dubes yang notabene kita yang biyai dan apalagi dia tidak punya prestasi, jadi agak aneh buat saya," katanya.

## Tidak matang

Saat dihubungi terpisah, kemarin, Djoko Susilo kembali menekankan, kritik yang disampaikan tersebut adalah untuk perbaikan DPR ke de-

pan. Pasalnya, ia mengeluhkan, agenda-agenda studi banding DPR selama ini sering kali belum matang. "Harusnya kan sudah tahu tujuannya mau apa? Mau ke lembaga A, B, C. Tidak sekadar bagi-bagi saja, oh negara ini belum, kita studi banding ke sana," ujarnya.

Seharusnya, menurut mantan anggota DPR Fraksi PAN itu, tujuan studi banding sudah ditentukan sejak awal. Idealnya sejak awal masa sidang, "Sehingga waktu yang disediakan cukup memadai. Kita pun bisa siap-siap. Kalau sekarang itu

menjelang akhir masa sidang baru memberi tahu, nanti mareses akan kunjungan ke sini. Waktu yang hanya tiga atau empat minggu menyebabkan perencanaan tidak matang."

Apalagi, waktu kunjungan kerap tidak menyesuaikan dengan keadaan di negara tujuan. Misalnya berkunjung ke negara-negara di Eropa pada musim panas. Padahal, pada waktu itu anggota dewan di Indonesia sedang masa reses alias tidak ada di tempat. (Ant/P-3)

nuruliah@mediaindonesia.com

# Komisi VIII ke Australia Bawa Anak Istri

Komisi VIII bahkan tidak menjadwalkan untuk bertemu secara resmi dengan parlemen federal maupun negara bagian di Australia.

## NURULIA JUWITA

**K**OMISI VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal-asalan membuat jadwal kunjungan kerja ke Australia pada 26 April-2 Mei mendatang.

Akibatnya, kunjungan Komisi VIII ke Australia lebih menyerupai kunjungan wisata jika dibandingkan dengan maksud dan tujuan awalnya sebagai kunjungan kerja.

Hal itu diungkapkan Peratuan Pelajar Indonesia di Australia dalam surat terbukanya kepada Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding, yang dimuat pada situs *wawu.ppi-australia.org*. Surat terbuka itu dibuat Mochamad Subhan Zein dan Dirgayuza Setiawan selaku ketua umum dan wakil ketua umum PPI Australia.

Berdasarkan jadwal yang diterima PPI Australia, delegasi Komisi VIII tidak dijadwalkan untuk melihat langsung penanganan warga miskin Australia

di Sydney, Canberra, dan Melbourne. Misalnya kunjungan ke rumah bersama (*shared/public housing*), kantor pelayanan Centerlink, dan pusat pelayanan komunitas tertinggal. Delegasi Komisi VIII juga tidak dijadwalkan untuk mengadakan diskusi dengan akademisi serta mahasiswa Indonesia di Australia, dengan topik diskusi yang relevan dengan maksud dan tujuan kunjungan kerja.

Bahkan, karena jadwal kunjungan kerja Komisi VIII ke Australia bertepatan dengan masa reses Paskah Parlemen Australia serta Parlemen Negara Bagian New South Wales dan Victoria, tidak ada jadwal pertemuan dengan perumus dan pengambil kebijakan pada tingkat federal dan negara bagian di Australia pada jadwal tentatif kunjungan kerja itu.

Komisi VIII yang diagenda akan mengunjungi sekolah Malek Fadh Islamic School dan Federation of Islamic Councils juga dinilai tidak terkait dengan

kerjanya dalam pembahasan RUU Penanganan Fakir Miskin. Lebih parah lagi; berdasarkan informasi yang didapatkan PPI dari Senayan, delegasi Komisi VIII itu juga membawa anak dan istri, dan menghabiskan uang negara Rp811,8 juta.

Pada surat terbuka itu, PPI Australia mengusulkan agar rombongan Komisi VIII DPR mengunjungi daerah khusus Northern Territory untuk melihat secara langsung langkah pemerintah Australia dalam memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan keamanan untuk 15 komunitas paling miskin dan termarginalkan di Australia. Termasuk mengunjungi kantor-kantor pelayanan Centerlink, *shared community housing*, dan inisiatif lain pemerintah Australia untuk warga miskin di Sydney dan Melbourne untuk melihat sendiri bagaimana pelayanan untuk *unlucky Australians* dilakukan di kota-kota besar.

Komisi VIII juga disarankan

### Daftar Rombongan Komisi VIII DPR ke Australia

1. Abdul Kadir Karding (PKB/Ketua rombongan)
2. Ahmad Zainuddin (PKS) bersama staf
3. Jazuli Juwaini (PKS)
4. Retu Siti Romlah (PD)
5. Aji Farida Padmo Ardan (PD)
6. Muhammad Saiful Anwar (PD) beserta istri
7. Tety Kadi Bawono (PG)
8. Chairun Nisa (PG)
9. Zulkarnaen Djabbar (PG) beserta istri
10. Rukmini Buchori Kastubi (PD/PP)
11. Ina Ammania (PD/PP)
12. Abdul Razak Rais (PAN) bersama anak
13. Sumintarsih Muntoro (PAN)
14. Kalpika Wasis (Setjen DPR)
15. Albulrojak Iskak (Setjen DPR)
16. Astriana Sinaga (staf ahli)

Sumber: [www.ppi-australia.org](http://www.ppi-australia.org)

mengadakan diskusi dengan *Australian permanent residency* yang menerima bantuan secara reguler dari Centerlink/pemerintah Australia untuk melanjutkan hidup karena pemutusan hubungan kerja, cacat fisik, dan alasan lainnya.

### Tidak optimal

Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis tidak memungkir bahwa saat ini masih ada anggota dewan yang mengajak anggota keluarganya saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

"Memang sebetulnya jangan ikut. Tidak merugikan negara karena bayar sendiri. Tetapi ini membuat kerja tidak optimal," ujarnya. Iskan sendiri tidak ikut ke Australia.

Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Rادیyo Gambiro tidak bersedia memberikan penjelasan. "Jangan ditanyakan ke saya." (\* / P-5)

nurulia@mediasindonesia.com

Komisi VIII juga disarankan

Komisi VIII juga disarankan

Sumber: [www.ppi-australia.org](http://www.ppi-australia.org)

Sumber: [www.ppi-australia.org](http://www.ppi-australia.org)

# Agenda Pelesiran Diatur Sekjen DPR

Informasi kunjungan ke luar negeri sengaja dibuat simpang siur. Padahal, agenda resmi sudah di tangan.

**NURULIA JUWITA SARI**

**K**UNJUNGAN Komisi X ke Spanyol dan Komisi VIII ke Australia dinilai sia-sia karena berbarengan dengan masa reses (istirahat) parlemen setempat. Namun, anggota Komisi III DPR dari F-PDIP Gayus Lumbuun menyatakan kesia-siaan itu bukanlah kesalahan anggota DPR seluruhnya.

Pasalnya, kata Gayus, pengaturan agenda kunjungan kerja DPR dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, sebagai penanggung jawab utama urusan keprotokoleraan parlemen.

"Pengaturan (jadwal kunjungan kerja) bukan salah anggota DPR. Sekjen yang mengagendakan. Itu urusan protokol," cetus Gayus, ditemui se usai sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan biasanya anggota DPR sudah tahu bersih, ke mana saja tujuan mereka nantinya. "Anggota kan enggak tahu. Sekjen yang ngatur," jawabnya kembali, saat ditanya apakah anggota DPR pernah mengecek ulang kembali, jadwal yang disusun sekjen.

Penolakan kunjungan kerja Komisi VIII 26 April-2 Mei 2011 ke Australia dalam rangka pembuatan RUU Penanganan Fakir Miskin dipertanyakan karena parlemen Australia masih reses terkait libur Paskah.

Delegasi Komisi VIII yang dipimpin Abdul Kadir Karding dari Fraksi PKB itu juga membawa anak dan istri, serta menghabiskan uang negara paling sedikit Rp811,8 juta (*Media Indonesia*, 26/4).

## Kecolongan

Atas informasi tersebut, Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno di Gedung DPR, Jakarta, mengaku pihaknya kecolongan. "Terus terang kami tidak mendapat informasi yang cukup kalau parlemen di sana reses," katanya.



**Sekjen yang mengagendakan. Itu urusan protokol."**

## Gayus Lumbuun

Anggota Komisi III DPR

Teguh menerangkan, anggotanya yang akan mengikuti kunjungan ke luar negeri harus mengisi *form* penugasan sebelum disetujui. *Form* itu berisi catatan kunjungan, untuk apa, di mana, ketemu siapa, dan tujuannya apa? "Waktu kami beri persetujuan, argumennya cukup meyakinkan," tukasnya.

Jika parlemen setempat reses, kata Teguh, seharusnya kunjungan tersebut dijadwal ulang. Pembatalan itu pernah dilakukan Komisi I karena Negara Amerika Serikat yang mereka tuju juga sedang reses.

"Seharusnya Komisi VIII dan X pun menunda kunjungan," tegasnya.

Dua anggota F-PAN yang tercatat ikut dalam rombongan itu

adalah Abdul Razaq Rais yang membawa anak dan Sumintarsih Muntoro.

Dari ketidakjelasan agenda dua komisi itu, Effendy Choirie, anggota Komisi I DPR dari F-PKB, menilai kunjungan kerja terbukti hanya untuk menuruti keinginan sendiri, bukan kepentingan rakyat.

Di sisi lain, informasi terkait kunjungan alat kelengkapan DPR ke luar negeri sulit didapat. Untuk meminta konfirmasi terhadap kunjungan Komisi VIII ke Australia saja, tak satu pun ketua maupun anggota yang mampu memberikan jawaban komprehensif.

Koordinator Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan itu menjadi bukti ada yang disembunyikan oleh anggota DPR.

Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyatakan ketidakjelasan agenda Komisi X dan Komisi VIII membuktikan bahwa anggota DPR datang sekadar untuk pelesiran.

Berkaca dari peristiwa memalukan itu, Wakil Ketua DPR dari F-PDIP Pramono Anung mengaku akan mengevaluasi kunjungan komisi dan alat kelengkapan DPR ke luar negeri.

Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin yang memimpin kunjungan kerja RUU Intelijen ke Italia dan Prancis pada 14-20 April, mengaku siap mempertanggungjawabkan hasil kunjungan itu. "Nanti akan didiskusikan ke pemerintah." (\* / P-4)

nuruliah@mediaindonesia.com

# Soal Pelesiran DPR Lempar Kesalahan

Perilaku pelesiran ke luar negeri minim transparansi agenda beserta alasan dan pertanggungjawaban.

**FARDIANSAH NOOR**

**A**NGGOTA DPR saling lempar kesalahan soal kunjungan kerja ke luar negeri. Pimpinan DPR mengaku kunjungan kerja anggota dewan kerap tidak transparan. Padahal, pimpinan DPR berhak menolak izin perjalanan yang tidak jelas.

Bahkan, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan di Jakarta, Sabtu (30/4), menyangku perjalanan ke luar negeri kerap tidak memprioritaskan transparansi agenda dan alasan kunjungan.

"Saya sering tegaskan ke anggota DPR, sebaiknya kalau ada kunjungan harus transparan disampaikan ke publik," ujar dia.

Taufik juga mengimbau kepada anggota DPR untuk mengefisienkan kunjungan kerja ke luar negeri. Efisiensi yang dimaksud adalah selain mengurangi intensitas kunjungan, juga prioritas kunjungan.

"Kami tidak melarang, tetapi harus diefektifkan dan disampaikan kepada masyarakat baik sebelum dan sesudah berangkat," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari F-PDIP Gayus Lumbuun mengatakan agenda kunjungan ke luar negeri di saat insitusi yang dituju sedang reses adalah tanggung jawab kepala bagian sekretariat (kabagset) di alat kelengkapan masing-masing.

"Bila kunjungan anggota DPR ke luar negeri dilakukan pada saat parlemen luar negeri reses, itu tanggung jawab kabagset di alat kelengkapan masing-masing. Karena mereka yang mengatur agenda perjalanan dalam bentuk protokol," ujar Gayus.

**Kami tidak melarang, tetapi harus diefektifkan."**

**Taufik Kurniawan**

Wakil Ketua DPR dari F-PAN

Menurutnya, pimpinan DPR tidak bisa dipersalahkan bila perjalanan ke luar negeri justru berlangsung saat parlemen di luar negeri sedang reses.

Akan tetapi, lanjutnya, pimpinan DPR bertanggung jawab terhadap perizinan saat kunjungan luar negeri. Dengan begitu, lanjut dia, pimpinan DPR berkewajiban untuk menolak izin kunjungan ke luar negeri bila tidak punya urgensi.

Sebelumnya, Komisi VIII 26 April-2 Mei 2011 melakukan kunjungan kerja ke Australia dalam rangka pembuatan RUU Penanganan Fakir Miskin. Hanya saja, kunjungan itu berlangsung saat parlemen Australia masih reses terkait dengan libur

Paskah.

Apalagi delegasi Komisi VIII yang dipimpin Abdul Kadir Karding dari Fraksi PKB itu juga membawa anak dan istri, serta menghabiskan uang negara paling sedikit Rp811,8 juta (*Media Indonesia*, 26/4).

Sejumlah anggota Komisi I DPR yang dipimpin Salim Mengga melakukan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia, sejak 25 April. Para anggota dewan, selain bertemu pejabat Kementerian Luar Negeri dan Badan Federal untuk Kerja Sama Teknik Militer, berkunjung ke Kantor Berita *Ria Novosti*, Kantor Dewan Mufti Rusia, dan Universitas Ketumuran.

Menurut anggota Komisi I DPR dari F-PG Enggartiaso Lukita, pertemuan itu antara lain membahas perang melawan teroris. "Mereka juga bertanya tentang bom buku," jelasnya.

**Bertolak ke Irak**

Ketua DPR Marzuki Alié juga akan memimpin delegasi anggo-

ta DPR ke Irak untuk membicarakan kemungkinan meningkatkan kerja sama bidang energi.

Selain Marzuki Alié, delegasi yang berangkat adalah Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Hidayat Nur Wahid dan dua anggota BKSAP DPR, yaitu Syotwali Mohzaib (F-PD) serta Abdul Suseno (F-PKS). Tujuh orang DPR juga turut dalam delegasi yang dijadwalkan tiba kembali di Tanah Air pada 6 Mei.

Wakil Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Auslin Dirgayuza Setiawan kemarin mengkritik perjalanan Komisi VIII ke Australia. Bahkan, menilai rancu bila Departemen Luar Negeri Australia (Department of Foreign Affairs & Trade - DFAT) tidak mengadakan pertemuan dengan perumusan dan kebijakan di Australia untuk Tim Panitia Kerja (Panja) RUU Komisi VIII DPR. (\* / Ant/1-1)

fardiansah@mediaindonesia.com

# Dua Pasal RUU MK Rp1,2 M

Ketua DPR menilai jumlah rombongan DPR RI masih jauh lebih kecil ketimbang parlemen China dan Iran.

NURULIA JUWITA SARI

**K**OMISI III DPR diduga menghabiskan Rp1,2 miliar untuk melakukan kunjungan kerja ke Jerman. Kunjungan kerja itu dalam rangka revisi dua pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau benar punya logika sehat, uang Rp1,2 miliar tidak perlu dihambur-hambur di Jerman karena revisi UU MK hanya 2 pasal dan tidak memerlukan anggaran sebesar Rp1,2 miliar," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi di Jakarta, kemarin.

Ia menuding perjalanan itu hanya sebagai pengisi kekosongan waktu reses DPR. Apalagi, lanjutnya, kunjungan kerja yang berlangsung antara 25 April-1 Mei itu terkesan tidak transparan.

Anggota Komisi III DPR dari F-Hanura Sarifuddin Sudding menjelaskan, perjalanan ke Jerman itu dilakukan oleh anggota Komisi III yang ada di Badan Legislasi (Balag) DPR. "Yang berangkat adalah mengatasnamakan Balag, bukan Komisi III," kata dia.

Ia mengakui kunjungan kerja itu terkesan sia-sia. Apalagi, perjalanan itu hanya untuk menyelesaikan dua pasal dalam revisi UU MK yang belum tuntas.

"Yang belum tuntas direvisi UU MK adalah mengenai usia pensiun hakim konstitusi dan kewenangan MK dalam menangani sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada)," paparnya.

Uchok juga menyoroti rencana perjalanan Ketua DPR Marzuki Alie ke Irak. Pasalnya, kunjungan itu bakal mengikutsertakan tujuh orang staf. "Keberangkatan rombongan Ketua DPR ini dengan 7 staf sudah melanggar ketentuan yang diatur oleh Sekretariat Jen-

deral DPR. Semestinya, setiap alat perlengkapan yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri hanya boleh membawa dua orang staf. Itu berarti DPR melakukan pemborosan uang negara," ujar dia.

Menurut dia, imbauan Marzuki Alie yang meminta anggota DPR membatasi perjalanan ke luar negeri hanya sebagai pemanis bibir untuk menarik simpati publik.

Marzuki Alie menjelaskan, kunjungan ke Irak adalah memenuhi undangan resmi ketua parlemen negara setempat. Kunjungan tersebut membicarakan kemungkinan meningkatkan kerja sama di bidang energi. "Kepergian saya juga dibawa ke rapat pimpinan, disetujui untuk memenuhi undangan tersebut," ujar dia melalui SMS.

Selain Marzuki, rombongan yang berangkat, antara lain, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan dua anggota BKSAP, yaitu Syofwatillah Mohzaib' (F-PD) dan Abdul Aziz Suseno (F-PKS). Tujuh orang dari sekretariat jenderal (setjen) juga turut dalam delegasi.

Menurut Marzuki, jumlah itu jauh lebih kecil ketimbang rombongan parlemen luar negeri. "Ketua Parlemen China membawa rombongan lebih dari seratus orang pakai pesawat khusus. Ketua Parlemen Iran rombongannya lebih besar, lebih dari 20 orang. Saya membawa rombongan sangat terbatas sudah dipertanyakan," tuturnya.

#### Tambah staf

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Arwani Tomafi memastikan rencana penambahan staf ahli anggota dewan akan terealisasi. Soal jumlah staf ahli itu yang akan dilihat selama hasil kunjungan kerja BURT DPR ke Amerika Serikat (30 April-6 Mei) dan Inggris pada (1 April-7 April). (\* / P-1)

nuruliah@mediaindonesia.com

## Anggaran Kunjungan Kerja DPR

Komisi I	Komisi XI
*Amerika Serikat (AS) Rp1,405 miliar	*Spanyol Rp1,320 miliar
*Turki Rp809,9 juta	*RRC Rp668,730 juta
*Rusia Rp1,286 miliar	
*Prancis Rp944,5 juta	
*Spanyol Rp1,201 miliar	
Komisi III	Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR
*Jerman Rp1,222 miliar	*Inggris Rp1,574 miliar
	*AS Rp1,966 miliar
Komisi VIII	Rombongan Ketua DPR
*Republik Rakyat China (RRC) Rp668,730 juta	*Irak Rp618,9 juta
*Australia Rp811,8 juta	

Sumber: Seknas Fira/ Grafis: CAKSONO

# Pelesir DPR Terkendala Bahasa

Informasi yang didapat dalam perjalanan anggota DPR yang menghabiskan Rp800 juta bisa dilihat di internet.

KRISTANTYO WISNUBROTO

**D**PR semestinya tidak sembarangan memilih anggota yang mengikuti kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri. Sebab, minimnya pemahaman bahasa asing kerap membuat kunjungan kian tidak efektif.

"Yang berangkat semestinya memiliki ijazah pendidikan tinggi di negara tujuan atau di negara yang berbahasa yang sama dengan negara tujuan, atau memiliki sertifikasi kecakapan berbahasa asing," tulis Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia saat mengevaluasi hasil kunjungan kerja Komisi VIII



**Abdul Kadir Karding**  
Ketua Komisi VIII DPR

DPR di Australia.

PPI Australia yang diketuai Mochamad Subhan Zein itu menilai dalam pertemuan antara Komisi VIII DPR dan Manager for Aged Care and International Programs, Department of Health and Services Stephen Kelly serta Assistant Secretary for Multicultural Affairs, Department of Immigration and Citizenship Peter Van Vliet, terlihat kendala komunikasi yang ada.

Saat kedua pejabat Australia itu memberi pemaparan harus menggunakan dua orang penerjemah bahasa. Dari pihak penyaji menggunakan penerjemah untuk menjelaskan pemaparan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan seorang penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dari pihak Komisi VIII DPR.

Apalagi, seluruh paparan Peter Van Vliet dan Stephen Kelly bisa diakses dalam situs <http://www.humanservices.gov.au/customer>. Padahal, perjalanan enam hari di Australia yang diikuti 16 anggota Komisi VIII DPR itu telah menghabiskan Rp811 juta.

"Seorang Mr Stephen Kelly

yang didatangkan ke Indonesia tentu membutuhkan jauh lebih sedikit biaya ketimbang 16 anggota Komisi VIII DPR yang diterbangkan dari Tanah Air," terang PPI Australia.

Ketua Komisi VIII DPR yang memimpin rombongan ke Australia Abdul Kadir Karding berang terhadap pendapat itu. Politikus PKB itu menilai tuduhan PPI Australia hanya untuk cari sensasi.

Abdul Kadir juga menyayangkan ada anggota PPI Australia menyatakan hal buruk soal kunjungan kerja itu. "Dia telah mencitrakan parlemen Indonesia secara buruk di mata negara lain. Itu bentuk penghinaan. DPR adalah institusi kebanggaan negara Indonesia," terangnya.

**Pernyataan sikap**

Rombongan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang mengunjungi Inggris pada 1-6 Mei juga berhadapan dengan penolakan. Bahkan, dalam tatap muka yang digelar di Kedutaan Besar RI di London, Selasa (3/5) malam, dimulai dengan pembacaan pernyataan sikap PPI UK oleh Ketua Umum PPI UK Tara Hardika.

Inti pernyataan itu adalah pelajar Indonesia tidak mendukung kunjungan BURT DPR ke Inggris apabila BURT DPR tidak memberikan penjelasan maksud, tujuan, dan urgensi kunjungan kerja mereka ke Inggris.

"Kami sudah *clear* mengenai gedung. Namun, pada kunjungan kerja, mengapa sampai 13 orang anggota DPR diterbangkan ke Inggris? Apa *output* yang diinginkan?" tanya Tara.

Apalagi, perjalanan enam hari anggota BURT di Inggris itu menghabiskan anggaran Rp1,6 miliar. Anggota BURT Djamil Aziz mengelak dan menyatakan anggaran bepergian ke luar negeri sebagai warisan dari pemerintah, yaitu dibuat oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan disetujui oleh Menkeu.

"Kalau kami yang menyusun anggaran, kami tahu setiap kegiatan seharusnya membawa wartawan yang melaporkan apa yang kami lakukan," katanya. (\* /Ant/P-1)

kristantyo@mediaindonesia.com

# DPR tidak Punya SOP Studi Banding

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari mengakui dewan tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) dan aturan yang harus dipatuhi seluruh anggota dalam pelaksanaan studi banding. Karena itu, studi banding marak dilakukan anggota DPR.

Bahkan, dia meyakini fraksi-fraksi di DPR belum bisa berbuat tegas serta tidak memiliki kebijakan dan aturan yang kuat untuk mengontrol anggota yang melakukan perjalanan dinas luar negeri. Dia meng-

usulkan dibuat SOP yang tegas sebagai acuan anggota dewan melakukan studi banding ke luar negeri.

Apalagi, tambahnya, yang dipersoalkan dari studi banding adalah masalah akuntabilitas dan laporan kepada rakyat.

"Karena tiga pemimpin DPR sudah memulai merasakan keprihatinan, mari kita duduk bareng membuat kriteria dan harus mematuhi," kata Eva di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi)



MIMI/IFAN

**Eva Kusuma Sundari**

Anggota F-PDIP DPR

Sebastian Salang menyebutkan metode penganggaran studi banding ke luar negeri bagi anggota DPR harus diubah.

Selama ini dalam anggaran studi banding sudah ditetapkan alokasi anggaran maksimum, tapi dalam realisasinya belum tentu terpakai. Karena itu, ditengarai studi banding hanya untuk menghabiskan uang yang sudah dianggarkan.

"Dalam metode penganggaran studi banding terdapat kesalahan. Kunjungan kerjanya hanya untuk menghabiskan anggaran itu, tanpa lihat urgensinya," ujar Sebastian saat dihubungi *Media Indonesia*.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN, Taufik Kurniawan me-

nampak bila dikatakan studi banding ke luar negeri kebanyakan tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan kunjungan Komisi X DPR ke Stadion Santiago Bernabeu milik klub sepak bola Real Madrid. Kunjungan itu dinilai tepat karena Komisi X membawahkan bidang olahraga dan kepergian mereka ke Spanyol sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi X.

"Cukup strategis manakala meninjau stadion dan pusat pariwisata untuk pengembangan dalam negeri," tegasnya. (\* / P-5)

# Kunjungan Kerja ke Luar Negeri Bawa Agenda Pribadi

KUNJUNGAN kerja Komisi I DPR ke Amerika Serikat (AS) rupanya tidak hanya membawa agenda komisi tapi juga menyelipkan agenda pribadi.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari F-PDIP TB Hasanudin di Jakarta, kemarin, menjelaskan tidak ada agenda resmi Komisi I DPR untuk melobi pemerintah dan parlemen AS agar mencahup ceki al atas Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeeddin. "Itu kan agenda pribadi. Bukan agenda komisi," ujarnya.

Anggota Komisi I saat ini sedang mengadakan kunjungan ke AS. Agenda Komisi I ke AS antara lain bertemu Kongres AS membahas soal perizinan hibah pesawat tempur F16 milik AS untuk Indonesia. Selain itu, Komisi I meminta pencabutan ceki al Sjafrie.

Menurut Hasanudin, agenda lobi untuk pencabutan pencahupan Sjafrie tidak relevan dilakukan dewan. "Kalau ada orang perorangan anggota komisi bertanya soal pencabutan itu,

tidak jadi masalah. Itu hak pribadi. Tapi bukan agenda komisi," tegasnya.

Hasanudin, saat ditanya, apakah hal tersebut merupakan agenda partai tertentu? Dirinya enggan menjawab. Hasanudin berlalu sambil tertawa.

Saat dimintai tanggapan, Sjafrie mengaku tidak pernah meminta Komisi I DPR untuk melobi pemerintah dan parlemen AS agar mencabut status ceki al atas dirinya.

"Enggaklah. Sampai kaget saya. Harapannya? Saya berharap pekerjaan saya lancar saja," kata dia.

Wakil Ketua DPR dari F-PDIP Pramono Anung meminta agar ada evaluasi terhadap pelaksanaan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia juga mengaku kecewa melihat tingkah polah rekannya dalam kunjungan kerja.

Semisal, perjalanan sejumlah anggota Komisi X DPR ke Spanyol yang menghabiskan Rp1,32 miliar pada 24-30 April. Perjalanan itu antara lain

**11** Pimpinan juga harus membuat mekanisme yang transparan terutama untuk ke publik."

**Abdul Malik Haramain**  
Anggota DPR F-PKB

dengan agenda berwisata ke Stadion Santiago Bernabeu dan Stadion Nou Camp. Dua stadion itu milik klub elite sepak bola Spanyol, Real Madrid dan Barcelona.

"Kunjungan ke stadion, yang tidak produktif, itu harus dipikirkan," kata Pramono.

Anggota DPR dari F-PKB Abdul Malik Haramain meminta pimpinan DPR melakukan audit terhadap kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri. Audit itu menyangkut anggaran, efektivitas, serta maksud dan target kunjungan. "Pimpinan juga harus membuat mekanisme yang transparan

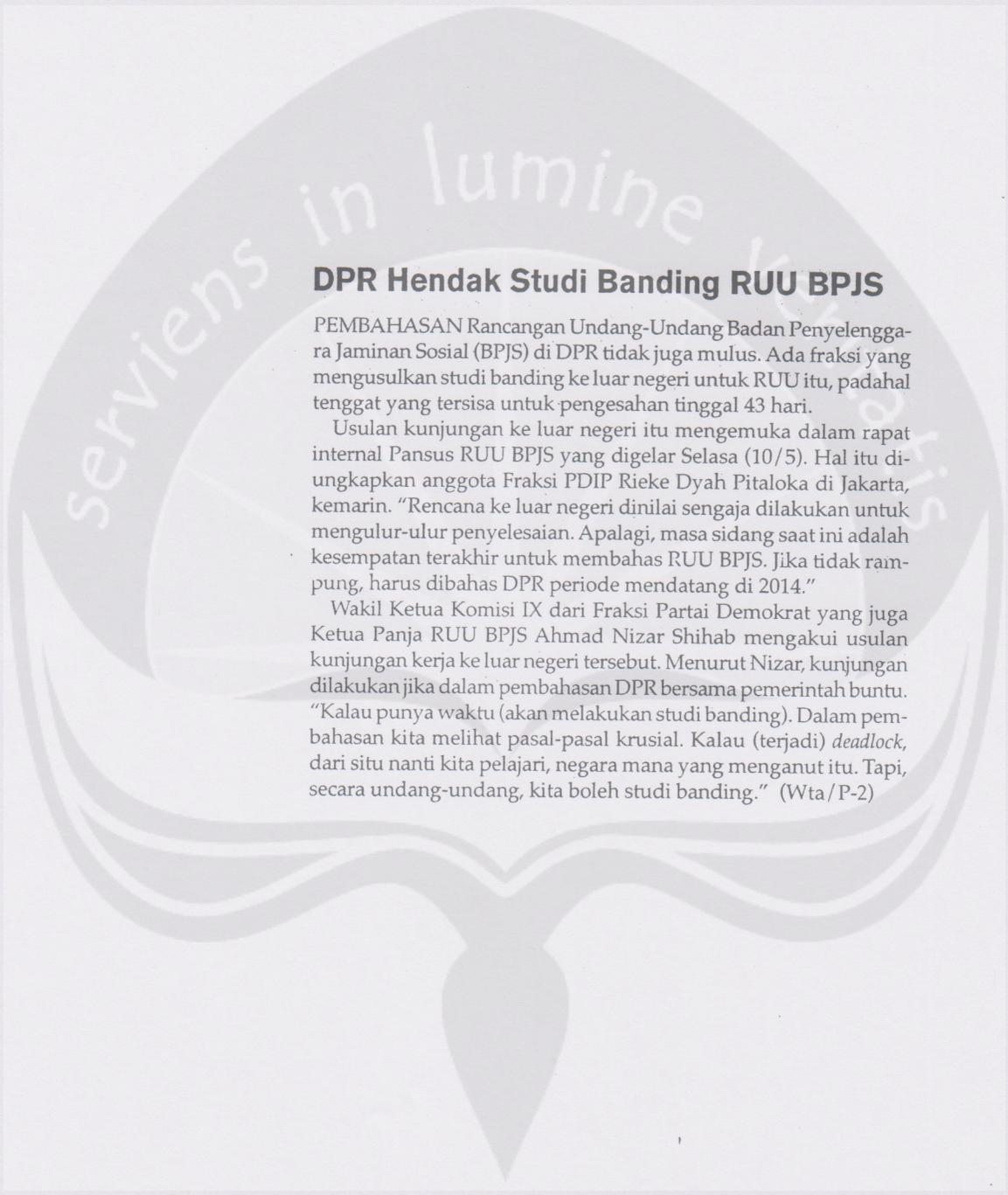
terutama untuk ke publik," tukasnya.

Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, Komisi I DPR yang membawa agenda pribadi dalam kunjungan kerja ke AS memperlihatkan agenda kunjungan kerja yang tidak jelas.

Karena itu, lanjut dia, anggota DPR berusaha mencari-cari agenda yang tidak substansial dan relevan sebagai alasan untuk menghabiskan anggaran atau pelesir di luar negeri.

DPR, lanjut Sebastian, memang tidak pernah memedulikan detail perencanaan agenda yang matang saat kunjungan kerja ke luar negeri. Agenda yang diusung juga sering tidak tepat sasaran.

Hal itu terjadi, menurutnya, karena DPR menggunakan voting saat menentukan negara tujuan. "Akibatnya, berbagai alasan tidak substansial masuk dalam agenda." (\* /SZ/P-1)



### DPR Hendak Studi Banding RUU BPJS

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di DPR tidak juga mulus. Ada fraksi yang mengusulkan studi banding ke luar negeri untuk RUU itu, padahal tenggat yang tersisa untuk pengesahan tinggal 43 hari.

Usulan kunjungan ke luar negeri itu mengemuka dalam rapat internal Pansus RUU BPJS yang digelar Selasa (10/5). Hal itu diungkapkan anggota Fraksi PDIP Rieke Dyah Pitaloka di Jakarta, kemarin. "Rencana ke luar negeri dinilai sengaja dilakukan untuk mengulur-ulur penyelesaian. Apalagi, masa sidang saat ini adalah kesempatan terakhir untuk membahas RUU BPJS. Jika tidak rampung, harus dibahas DPR periode mendatang di 2014."

Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat yang juga Ketua Panja RUU BPJS Ahmad Nizar Shihab mengakui usulan kunjungan kerja ke luar negeri tersebut. Menurut Nizar, kunjungan dilakukan jika dalam pembahasan DPR bersama pemerintah buntu. "Kalau punya waktu (akan melakukan studi banding). Dalam pembahasan kita melihat pasal-pasal krusial. Kalau (terjadi) *deadlock*, dari situ nanti kita pelajari, negara mana yang menganut itu. Tapi, secara undang-undang, kita boleh studi banding." (Wta/P-2)

# Tenaga Ahli Komisi VIII Jadi Korban

**ROMBONGAN** Komisi VIII yang melakukan studi banding ke Australia mempermalukan diri sendiri dengan salah menyebut alamat *e-mail* komisinya. Akibatnya, tenaga ahli Komisi VIII dikorbankan dengan alasan akan mengundurkan diri.

Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding mengatakan, Astriana, tenaga ahli Komisi VIII yang salah menyebutkan alamat *e-mail* komisinya@yaho.com, akan mengundurkan diri dari jabatannya. Kesalahan penyebutan alamat *e-mail* itu diunduh ke dunia maya dan menjadi bahan tertawaan orang-orang yang

menontonnya.

"Tampaknya yang bersangkutan akan mengundurkan diri. Yang jelas ini pelajaran bagi seluruh staf tenaga ahli dan seluruh staf terlibat harus lebih hati-hati," kata Karding saat dihubungi wartawan di Gedung DPR, kemarin.

Dia menyebutkan, Astriana telah meminta maaf kepadanya karena telah salah menyebutkan *e-mail* Komisi VIII seharusnya beralamat *bahwaset\_komis8@dpr.go.id*.

Namun, Direktur Lingkaran Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyebutkan,

mundurnya Astriana diindikasikan berlatar belakang tekanan dari anggota DPR. "Pengunduran diri itu lebih karena ada tekanan, tidak mungkin orang ini mau mengundurkan diri. Dia dikorbankan," cetus Ray.

Tekanan itu, tambahnya, menunjukkan anggota DPR tidak memahami substansi kritik yang dilontarkan kepada mereka. Dia menilai tekanan mundur terhadap Astriana memperlihatkan kekerdilannya anggota dewan. Apalagi, kritik masyarakat sesungguhnya adalah atas kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri.

"Kasus itu semua orang mau mengatakan masalahnya bukan *e-mail*-nya. Kita mempersoalkan kunjungan kerja malah dijawab dengan pemecatan staf ahli. Kalau publik mengolok-olok bukan karena itu, pada dasarnya kesal karena studi banding. Jangan dijawab memecat," tukas Ray.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh menyomasi lembaga swadaya masyarakat Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra). Dia akan mengambil langkah hukum jika Seknas Fitra tidak mencabut atau menarik

pernyataan mengenai anggaran pulsa yang mencapai Rp14 juta per bulan untuk tiap anggota. Setjen juga meminta Seknas Fitra meminta maaf kepada semua media nasional yang memuat berita tentang uang pulsa DPR.

"Apabila dalam tiga hari hak jawab ini tidak diindahkan, kami akan menempuh upaya hukum," tegas Nining.

Sekjen Seknas Fitra Yuna Farhan menegaskan pihaknya siap menerima somasi dari DPR. Menurutnya, somasi terhadap Fitra merupakan bagian dari perjuangan untuk meluruskan institusi DPR. (Wta/\* /P-4)

# Komisi I DPR ke Luar Negeri

## Anggota Partai Gerindra Menolak Ikut

JAKARTA, KOMPAS — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat memanfaatkan masa reses yang dimulai Senin lalu untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Lima negara tujuan adalah Amerika Serikat, Turki, Rusia, Perancis, dan Spanyol.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Kamis (14/4), menuturkan, rombongan ke Spanyol sudah berangkat pada Rabu malam. Rombongan lain akan menyusul dengan waktu kunjungan efektif sekitar lima hari.

Menurut Mahfudz, kunjungan dengan setiap rombongan berisi sekitar 10 anggota DPR ini dimaksudkan untuk mencari masukan tentang industri pertahanan, RUU Intelijen, serta melihat kebijakan politik sejumlah negara untuk beberapa isu.

Mahfudz yang akan berangkat ke Turki pada 17 April mengaku tidak mengetahui pasti biaya kunjungan kerja untuk komisinya. Dia memastikan semua anggaran, seperti untuk transportasi, akomodasi, dan representasi, disusun sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menuturkan, anggaran yang disediakan untuk kunjungan kerja Komisi I DPR tersebut Rp 4,5 miliar. "Kunjungan kerja itu sangat menyakitkan. Uang dari pajak rakyat hanya dipakai anggota DPR untuk jalan-jalan ke luar negeri. Kunjungan itu juga menunjukkan, anggota DPR sudah lepas diri dari tanggung jawabnya



### Sejumlah Studi Banding DPR

Tanggal	Detail Kegiatan	Biaya
13-19 Sep 2010	• Panitia Kerja RUU Hortikultura dari Komisi IV (12 orang) ke Belanda dan Norwegia. • Komisi X ke Afset, Korsel, dan Jepang untuk mempersiapkan RUU Pramuka.	Rp 3,7 miliar
21-26 Sep 2010	Komisi III (10 orang) ke London untuk mempersiapkan RUU Keimigrasian.	*
1-7 Okt 2010	Komisi III ke Kanada untuk mempersiapkan RUU Mata Uang.	*
19-21 Okt 2010	Badan Legislasi DPR (20 orang) ke Jepang untuk mengetahui proses legislasi.	*
23-30 Okt 2010	Badan Kehormatan DPR (8 orang) ke Yunani untuk mempelajari etika parlemen.	Rp 1,5 miliar
30 Okt-6 Nov 2010	Panitia Khusus RUU Otoritas Jasa Keuangan (40 anggota) ke Inggris, Jerman, Jepang, Korea Selatan.	Rp 1,7 miliar
1-9 Nov 2010	Komisi II ke China dan India studi banding sistem kependudukan dan program kesejahteraan rakyat.	*

\* = tidak ada data Sumber: Litbang Kompas/NDW, dari pemberitaan "Kompas" NOVAN

kepada konstituen. Yang seharusnya diutamakan anggota DPR pada masa reses adalah mengunjungi konstituen, bukan pergi ke luar negeri," kata Uchok.

Perjalanan Komisi I ke luar negeri, lanjut Uchok, makin pantas dipertanyakan karena sebelumnya tidak diumumkan secara resmi. Padahal sebelumnya ada kesepakatan di DPR, kunjungan kerja ke luar negeri harus diumumkan dulu ke masyarakat.

### Gerindra menolak

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Ahmad Muzani, menyatakan tak ikut ke Rusia. Pada 21 Maret 2011 Partai Gerindra mengeluarkan surat larangan bagi setiap anggota Fraksi Partai Gerindra untuk pergi ke luar negeri dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, lanjut Muzani, hanya boleh pergi ke luar negeri jika itu me-

rupakan kunjungan muhibah, untuk kepentingan Grup Kerja Sama Parlemen (GKSP), atau untuk keperluan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).

Kebijakan ini diambil karena kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri dapat diganti dengan cara yang lebih hemat. Misalnya dengan memanfaatkan jaringan di kedutaan besar Indonesia di luar negeri, studi di perpustakaan, atau melalui pencarian data di internet.

"Kunjungan ke luar negeri seharusnya lebih selektif agar dapat dihemat," kata Muzani, yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR.

Muzani memperkirakan, frekuensi kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri pada tahun 2011 dan 2012 akan semakin tinggi. Pada saat yang sama biaya transportasi dan akomodasi juga semakin mahal. (NWO)



DK 0009 5162

## KUNJUNGAN DPR

## Anggota Lain Juga ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat bukan satu-satunya alat kelengkapan DPR yang mengisi masa reses kali ini dengan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Rencananya Komisi VIII, Komisi X, dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR akan pergi juga.

Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Jumat (15/4) di Jakarta, menuturkan, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR 2011, biaya kunjungan kerja empat alat kelengkapan DPR tersebut mencapai Rp 12 miliar.

Uchok menuturkan, Komisi VIII DPR akan pergi ke China dan Australia pada 17-24 April 2011. Komisi X akan ke Spanyol pada 24-30 April 2011. BURT DPR ke Inggris dan Amerika Serikat pada 1-7 Mei 2011.

"Keberangkatan BURT ke Amerika Serikat dan Inggris seperti ingin merayakan keberhasilan mereka karena rencana pembangunan gedung baru DPR dapat terus berjalan," tutur Uchok.

Sebelumnya, Komisi I DPR secara bertahap pergi ke Amerika

“  
Kunjungan Komisi I DPR ke Amerika Serikat antara lain untuk minta pencabutan cekal terhadap Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Serikat, Tuki, Rusia, Perancis, dan Italia.

Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan tidak dapat melarang kunjungan kerja tersebut karena persetujuan kepergian acara itu ada di tingkat Wakil Ketua DPR. Anggaran kegiatan juga sudah ada. "Jika mau efisiensi, fraksi jangan mengizinkan anggotanya untuk pergi," kata Marzuki, yang juga Ketua BURT.

Dari sembilan fraksi di DPR, saat ini hanya Fraksi Partai Gerindra yang melarang anggotanya pergi ke luar negeri dengan kepentingan untuk kunjungan kerja atau studi banding.

Marzuki mengaku pernah meminta dalam rapat pimpinan DPR agar kunjungan kerja ke luar negeri dikurangi. Caranya antara lain setiap fraksi diminta menggilir anggotanya yang akan ke luar negeri. Usul ini ditolak dengan alasan setiap anggota DPR memiliki hak konstitusi sehingga tidak dapat diwakilkan.

Marzuki juga mengingatkan, setiap rencana kunjungan kerja dibahas di BURT DPR yang anggotanya dari perwakilan semua fraksi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman mengaku, komisinya lalai karena tidak melaporkan rencana kunjungan kerja komisinya ke masyarakat.

Hayono yang pada 6 Mei akan memimpin rombongan komisinya pergi ke Amerika Serikat menjelaskan, kunjungannya itu antara lain untuk minta pencabutan cekal terhadap Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie yang mantan Panglima Kodam Jaya dicekal masuk oleh Amerika Serikat karena diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1998. (NWO)

as produksi buah Indo-  
aah lebih baik daripada  
Buah-buahan dari China  
nya cukup lama di cold  
sehingga menyebabkan  
g segar. Namun, harga  
lokal di pasar domestik  
mahal. Artinya ada yang  
di kita sehingga tidak bisa  
ng dengan produk China  
onesia," ujar Suswono.  
mencontohkan harga jeruk  
mak yang di tingkat petani  
00-Rp4.000/kg. Tetapi di  
harga menjadi Rp20 ribu/  
enurut Suswono, itu dis-  
oleh panjangnya rantai  
susi.

**Ada yang salah  
di kita sehingga  
bisa bersaing  
produk China  
donesia."**

**WONO**  
ri Pertanian

oduk buah-buahan tidak  
ng sampai ke konsumen  
etani. Para petani umum-  
menjual buah-buahan  
da para pedagang. Dari  
pedagang, buah dijual ke  
epul. Setelah itu, pengepul  
pedagang pasar menjual  
-buahhan tersebut kepada  
amen," ujarnya.

swono melanjutkan, kalah  
aingnya produk buah-  
an lokal ketimbang buah  
r dari China di pasar  
negeri membuat nilai  
agangan di sektor hortira-  
defisit. Data Kementan  
unjukkan neraca perda-  
an Indonesia pada sektor  
ikultura defisit US\$661  
dengan perincian ekspor  
ikultura ke China US\$12  
sedangkan nilai impor dari  
ia US\$673 juta.

ituk itu, Suswono melan-  
n, Kementan akan segera  
benahi karut-marut per-  
aan buah dalam negeri.  
entan akan merevisi 26  
r tani di seluruh Indonesia.  
r tani itu akan mendekati  
ni produksi, misalnya buah-  
an, langsung ke konsumen  
agga tidak ada rantai niaga  
; panjang. (\* / X-10)

# Indeks Studi Banding 2012 Naik 100%

Kinerja DPR terus memburuk, mestinya anggaran kunjungan kerja ke luar negeri dipotong.

**KRISTANTYO WISNUBROTO**

**D**PR tidak pernah  
kehabisan akal  
mengarang alasan  
pelebaran ke luar  
negeri dalam kemas  
studi banding. Biaya  
kunjungan ke luar ne-  
geri yang bakal naik  
100% sudah disetui  
semua fraksi.

Secara aklamasi dewan me-  
nyetujui kenaikan indeks biaya  
kunjungan kerja luar negeri di  
2012 sebesar Rp3,4 miliar per  
RUU. Itu artinya indeks naik dua  
kali lipat bila dibandingkan de-  
ngan 2011 sebesar Rp1,7 miliar.

Berdasarkan penelusuran *Me-  
dia Indonesia* di Jakarta, kemarin,  
indeks biaya kunjungan kerja  
luar negeri tertera dalam draf  
Rancangan Anggaran DPR yang  
dibahas pada 7 April 2011 antara  
pimpinan DPR, Badan Urusan  
Rumah Tangga (BURT), Badan  
Anggaran, dan perwakilan  
fraksi-fraksi. Draf itu kemudian  
disahkan dalam rapat paripurna  
dewan pada 8 April 2011 untuk  
selanjutnya dibahas dan dicocok-  
kan dengan APBN 2012.

Penaikan indeks itu merupa-  
kan konsekuensi logis penaikan  
klasifikasi golongan anggota  
DPR, yang semula golongan B  
menjadi golongan A. Penaikan  
klasifikasi itu berdampak pada  
penaikan indeks biaya kom-  
ponen tiket dan uang harian  
kunjungan kerja luar negeri.  
Biaya tiket kunjungan kerja yang  
sebelumnya berkelas bisnis naik

tingkat menjadi kelas eksekutif.

Selain itu, DPR mengusulkan  
pengalokasian anggaran sebesar  
Rp507 miliar untuk pemben-  
tukan dan pembahasan RUU.  
Bahkan, untuk pembentukan  
dan pembahasan sendiri me-  
nelan biaya Rp504 miliar yang  
dialokasikan bagi 76 RUU (35  
RUU usul DPR, 26 RUU usul  
pemerintah, 12 RUU pemekaran  
wilayah, dan 3 RUU ratifikasi).

Masih ada alokasi dana untuk  
penyempurnaan RUU usul DPR  
sebesar Rp1,026 miliar serta pe-  
rencanaan dan penetapan pro-  
legnas sebesar Rp2,222 miliar.

**Terus memburuk**

Anggota BURT dari Fraksi  
Partai Keadilan Sejahtera, Refri-  
zal, membenarkan adanya usul-  
an kenaikan komponen biaya  
kunjungan kerja luar negeri oleh  
alat kelengkapan dewan. "Semua  
fraksi tidak mempermasalahkan  
usulan kenaikan tersebut."

Ketua DPR Marzuki Alij men-  
jelaskan bahwa ia telah ber-  
usaha mengingatkan semua  
anggota DPR serta fraksi-fraksi  
untuk mengurangi kunjungan  
kerja ke luar negeri. Namun, kata  
dia, hingga sekarang imbauan  
tersebut belum dilaksanakan  
optimal. Menurutnya, urgensi  
kunjungan kerja ke luar negeri  
saat ini benar-benar sepenuh-  
nya diserahkan pada kebijakan  
ketua fraksi masing-masing.  
Ia menambahkan, pimpinan  
DPR tidak punya otoritas un-

tuk menghentikan  
kunjungan kerja kare-  
na itu tidak termuat dalam tata  
tertib DPR.

Usul penaikan komponen bia-  
ya kunjungan kerja luar negeri  
pada 2012, menurut Marzuki,  
telah disetujui seluruh fraksi.  
Usul penaikan tersebut sudah  
dibicarakan dalam rapat anta-  
ra pimpinan DPR, BURT, Badan  
Anggaran, dan perwakilan  
fraksi-fraksi. "Dalam rapat itu  
semua setuju dan tidak ada yang  
keberatan," tukas Marzuki.

Akan tetapi, bagi Koordinator  
Forum Masyarakat Peduli  
Parlemen Indonesia Sebastian  
Salang, usul penaikan indeks  
kunjungan kerja luar negeri itu  
hanya akal-akalan, sebab tidak  
punya parameter sama sekali.  
Sebagai lembaga publik, kata  
dia, seharusnya DPR segera  
mengumumkan ke publik soal  
usul penaikan tersebut berikut  
parameternya. "Kalau parame-  
ternya kinerja, seharusnya an-  
garan kunjungan kerja luar negeri  
dipotong. Kinerja DPR terus  
memburuk," tandasnya. (\* / X-3)

**kristantyo@  
mediaindonesia.com**  
Berita terkait him 3

Kirimkan tanggapan  
Anda atas berita ini  
melalui e-mail: [interupsi@mediaindonesia.com](mailto:interupsi@mediaindonesia.com)  
atau [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)

MI 19 April

## Aspek-Aspek Kenaikan Rancangan Anggaran DPR RI 2012



1. Biaya kunjungan kerja ke luar negeri	161,44%
2. Biaya perjalanan dinas ke luar negeri	233,33%
3. Biaya perjalanan dinas ke dalam negeri	100%
4. Biaya perjalanan dinas ke luar negeri	33,3%
5. Biaya perjalanan dinas ke dalam negeri	100%
6. Biaya perjalanan dinas ke luar negeri	178,94%

Sumber: DPR RI/Grafis: Frady

**ONLINE HARI INI** [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)

## Ingung Unta Liar dari Australia

AUSTRALIA mungkin akan meninggalkan sapi dan beralih ke daging unta sebagai komoditas ekspor mulai 2012. Hal itu dimungkinkan jika permintaan izin seorang pengusaha ir untuk membuka tempat pemotongan dan jolahan daging unta di selatan Australia bulkan.

lagdy El Ashram, sang pengusaha Mesir, mengatakan upaya bisnis daging unta tidak ya berdampak pada sektor ekonomi, tapi lingkungan. Pasalnya, populasi unta liar di tralia telah mendatangkan dampak ekolo-  
"Daging unta lebih sehat daripada daging

. Kandungan lemaknya paling kecil ketimbang daging lainnya."  
lenurutnya, peluang bisnis daging unta terbuka lebar. "Unta merupakan anan favorit di Timur Tengah, Afrika Utara, serta Eropa. Australia memi-  
xeluang untuk memenuhi kebutuhan daging unta tersebut," jelasnya.  
emerintah Federal Australia telah menyediakan US\$20 juta untuk  
gram penanganan masalah unta liar. Program pemusnahan unta liar di  
tralia dimulai sejak tahun lalu. Setiap tahun, unta-unta liar itu menim-  
an kerugian A\$10 juta. (Rtr/0L-04)



## Rp5,7 Miliar untuk Cukur Kaki Richard Branson

ADA-ADA saja yang dilakukan orang-orang kaya di dunia. Lihat saja yang dilakukan Richard Branson.

Di musim balap Formula 1 tahun lalu, ia bertarung dengan pemilik Air Asia, Tony Fernandez. Taruhannya berbandan seperti pramugari dan harus rela bulu kaki dicukur habis.

Kini, Branson yang kalah harus memegang janji walau bakal memaklumkan dirinya sendiri. Hal itu akan dilakukannya dalam sebuah penerbangan khusus dari London ke Kuala Lumpur, 1 Mei menda-  
tang. Dalam penerbangan itu Branson akan menjadi salah satu pramugari dan melayani sekitar 160 penumpang.

Tidak hanya itu, ia harus merelakan bulu kakinya dicukur habis dalam penerbangan tersebut. Penumpang yang berani membayar US\$650 ribu atau sekitar Rp5,7 miliar akan mendapat kehormatan mencukur habis bulu di kaki pemilik kelompok perusahaan Virgin Group tersebut.

Branson harus melakukan itu setelah tim yang dijagokannya menempati posisi di bawah tim yang dijagokan Fernandez. Kini kita tunggu saja siapa yang mendapat kehormatan untuk mencukur bulu orang Inggris yang ditaksir memiliki kekayaan sekitar US\$4 miliar tersebut. (AP/0L-04)



REUTERS/ALEX GALLARDO

## BACAAN F

**1 USIR JEF  
YOGHUR**  
BINTIK me-  
ganggu pe-  
Anda ingin  
tahu atau

**2 BRA AM  
KEPADA I**  
ungkapka  
mengguna-  
payudaran  
(Media Hit

**3 KIAM BEL**  
JIKA And-  
mungkin n  
sejumlah :  
bagus der

D  
J  
L

TEN  
dan:  
trilit  
dan  
per:  
Fau:  
G  
boli  
dan  
gan  
Mer

Al  
Wal

unt  
cep  
S

kap  
liur  
otsi  
per  
Pap  
F

Ot  
khu  
2%

ter  
da  
V

ka  
au  
me  
bel  
me  
sel  
l

ya  
lar  
sar  
l  
fik  
su-  
(M

# Biaya Satu RUU Rp 8,47 Miliar

## Anggaran Kunjungan ke Luar Negeri Naik

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran pembuatan rancangan undang-undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan naik dari Rp 6,8 miliar menjadi Rp 8,47 miliar di tahun 2012. Kenaikan itu terjadi lantaran adanya usulan peningkatan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka pembahasan RUU.

Tahun 2011, DPR mengalokasikan anggaran Rp 6,68 miliar untuk membuat sebuah RUU inisiatif DPR. Terdiri dari anggaran penyusunan RUU Rp 346,55 juta, perumusan RUU Rp 2,034 miliar, dan pembahasan RUU sebesar Rp 4,30 miliar. Dari Rp 4,30 miliar anggaran pembahasan, sebanyak 1,7 miliar di antaranya dialokasikan untuk biaya kunjungan kerja ke luar negeri.

Berdasarkan hasil rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar), anggaran pembuatan satu RUU inisiatif DPR diusulkan naik menjadi Rp 8,47 miliar. Sebesar Rp 2,21 miliar di antaranya akan dialokasikan untuk pembentukan RUU dan Rp 6,26 miliar untuk biaya pembahasan. Biaya pembahasan itu termasuk anggaran kunjungan kerja ke luar negeri yang diusulkan sebesar Rp 3,4 miliar.

Anggota BURT dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,

M Arwani Thomafi, Senin (2/5), di Kompleks Parlemen, Jakarta, mengatakan, kenaikan anggaran itu masih usulan.

"Masih panjang proses pembahasannya, masih harus dibahas di BURT, lalu dibahas dengan Banggar dan disetujui di paripurna sebagai usulan DPR, kemudian dibahas bersama pemerintah," katanya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ignatius Mulyono juga menegaskan, usulan anggaran Rp 8,47 miliar itu baru ancar-ancar. Usulan itu pun belum tentu disetujui oleh pemerintah.

### Kunjungan ke luar negeri

Anggaran pembuatan RUU diusulkan naik karena DPR merasa perlu meningkatkan anggaran kunjungan ke luar negeri dari Rp 1,7 miliar menjadi Rp 3,4 miliar.

Anggaran meningkat karena DPR berupaya menyesuaikan klasifikasi dari golongan B menjadi golongan A. Artinya, jika saat ini DPR memperoleh tiket pesawat kelas bisnis, tahun 2012

### LEGISLASI DPR

- ◆ 2009: Dari 82 target, 39 disetujui
- ◆ 2010: Dari 70 target, 16 disetujui
- ◆ 2011: Menargetkan 60 RUU

mereka bisa mendapat tiket kelas eksekutif.

Menurut Mulyono, penyesuaian diperlukan karena selama ini biaya kunjungan kerja ke luar negeri tidak mencukupi. Tidak sedikit anggota DPR yang terpaksa tombok untuk membayar tiket pesawat. "Waktu kami ke Jepang, kami harus *nombok* 600-1.200 dollar AS kalau naik kelas eksekutif, karena kami jatahnya bisnis," ujarnya.

Hal itu juga dialami Komisi VIII DPR saat mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. "Pagu anggaran yang kami dapat jauh di bawah standar. Untuk haji plus biayanya lebih dari 6.000 dollar AS selama 12 hari. Kami dapat di bawah itu," tutur Arwani.

Meski demikian, menurut Mulyono, Baleg sudah berupaya melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya biaya penyusunan RUU, Baleg hanya menghabiskan Rp 150 juta dari pagu anggaran Rp 346,55 juta. (NTA)

# Kunjungan Kerja Perlu Dikaji Ulang

## Komisi VIII DPR: Tujuan ke Australia Jelas

JAKARTA, KOMPAS — Kunjungan kerja ke luar negeri yang selama ini dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya didasari semangat memanfaatkan anggaran yang sudah dialokasikan. Karena itu, metode kunjungan kerja perlu dikaji ulang.

Usulan kaji ulang itu disampaikan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di Jakarta, Kamis (5/5). Kesalahan terjadi sejak penyusunan perencanaan anggaran. DPR biasanya langsung menetapkan plafon anggaran untuk beberapa kali kunjungan ke luar negeri. Padahal saat plafon anggaran ditetapkan, DPR belum menentukan rencana kunjungan kerja.

Seperti pada rencana anggaran tahun 2012 yang diusulkan DPR, sudah ditetapkan anggaran penyusunan dan pembahasan 76 rancangan undang-undang. Kegiatan kunjungan kerja masuk ke pos pelaksanaan fungsi legislasi yang anggarannya diusulkan Rp 541,28 miliar. Padahal, DPR belum menetapkan Program Legislasi Nasional tahun 2012.

Penetapan anggaran itulah yang dijadikan alasan DPR melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. "Semangatnya memang sudah keliru. Hanya karena anggarannya sudah ditetapkan, bukan karena ingin mengejar materi atau data yang dibutuhkan," kata Sebastian.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya metode kunjungan kerja dikaji ulang. Pengkajian ulang di-

### Polemik Seputar Kunjungan Kerja DPR ke Luar Negeri

Meski banyak dikritik, anggaran kunjungan kerja DPR ke luar negeri justru diusulkan naik, dari Rp 1,7 miliar menjadi Rp 3,4 miliar pada tahun 2012. Anggaran itu termasuk dalam pos anggaran pembuatan satu RUU inisiatif DPR yang dinaikkan dari Rp 6,8 miliar menjadi Rp 8,47 miliar.



#### Pro

**Marzuki Ali, Ketua DPR dan Ketua BURT:** "Tidak dapat melarang kunjungan kerja karena persetujuan kepergian acara ada di tingkat Wakil Ketua DPR. Anggaran kegiatan juga sudah ada. Jika mau efisien, fraksi jangan mengizinkan anggotanya pergi." (15/4/2011)

**M Arwani Thomafi, anggota BURT dari F-PPP:** "Kenaikan anggaran itu masih usulan. Masih panjang proses pembahasannya, masih harus dibahas di BURT, lalu dibahas dengan Banggar, dan disetujui di paripurna sebagai usulan DPR, kemudian dibahas bersama pemerintah." (2/5/2011)

**Chairuman Harahap, Ketua Komisi II DPR:** "Kunjungan kerja ke luar negeri tetap efektif. Setiap anggota DPR dapat melakukan perbandingan langsung kebijakan yang diterapkan di luar negeri dengan kondisi di dalam negeri." (4/5/2011)

**Ignatius Mulyono, Ketua Baleg DPR:** "Usulan anggaran baru ancar-ancar. Penyesuaian diperlukan karena selama ini biaya kunjungan ke luar negeri tidak mencukupi. Tidak sedikit anggota DPR terpaksa tombok untuk membayar tiket pesawat." (4/5/2011)

Sumber: Litbang Kompas/NDW, dari pemberitaan "Kompas"

#### Kontra

**Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR:** "Pangkas anggaran kunjungan kerja hingga 40 persen. Pimpinan DPR punya hak melarang kunjungan kerja yang dinilai tidak bermanfaat. Setiap kelompok di DPR yang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri juga harus memberi laporan kepada masyarakat." (20/4/2011)

**Pramono Anung, Wakil Ketua DPR:** "Kunjungan ke luar negeri sebaiknya hanya dilakukan untuk hal-hal yang penting, seperti dalam rangka Badan Kerja Sama Antarparlemen, kunjungan muhibah, dan untuk pembuatan UU yang memang perlu dan ada urgensinya." (20/4/2011)

**Uchok Sky Khadafi, Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Fitra:** "DPR melakukan perlawanan kepada masyarakat. DPR tidak mendengarkan masyarakat yang kerap menyarankan agar mereka tak perlu ke luar negeri." (4/5/2011)

**Erik Kurniawan, Indonesia Parliamentary Center (IPC):** "Kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPR tidak efektif karena waktunya terlalu singkat. DPR bisa meminta data atau dokumen dengan berkorespondensi melalui internet. Metode ini lebih murah dan hasilnya pun tidak jauh berbeda." (4/5/2011)

GUNAWAN

lakukan sejak perencanaan anggaran, pengajuan usulan kunjungan kerja, hingga pelaksanaan kunjungan kerja.

Sebastian mengusulkan, RUU diusulkan langsung oleh anggota DPR. Jika membutuhkan pendalaman atau perbandingan materi, barulah anggota DPR tersebut mengajukan proposal studi banding. Hasil studi banding harus dilaporkan ke publik.

"Karena pertanggungjawabannya personal, mereka tidak akan main-main. Kalau sekarang kan per kelompok, makanya mereka bisa berlindung di balik kelompok itu," ujarnya.

Sebelumnya, Erik Kurniawan dari Indonesia Parliamentary

Center mengatakan, metode yang lebih efektif dan efisien adalah mengirimkan staf atau tenaga ahli DPR ke luar negeri. "Mereka yang nantinya memberikan masukan terhadap materi RUU tertentu," kata Erik.

Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa kunjungan kerja ke Australia akhir pekan lalu dilakukan dengan tujuan jelas. Mereka mempelajari program pemberantasan kemiskinan dan melihat langsung praktik pelaksanaannya. "Kami bertemu beberapa pejabat. Kami juga bertemu masyarakat miskin di sana. Jadi agenda kami penuh, tidak main-main," katanya. (NTA/NWO)

# Anggota DPR Tak Mau Mendengar

## Kunjungan Kerja Sekadar Menghabiskan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tidak mau mendengar, tidak punya hati dan kepekaan terhadap protes yang dilancarkan masyarakat terhadap kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri. Ada kecurigaan terkait faktor finansial yang membuat DPR *ngotot* ke luar negeri.

"Mungkin ada anggota DPR yang tidak mau ke luar negeri, tetapi karena anggota DPR yang lain mau, jadi dia ikut karena ada solidaritas pertemanan, tak enak dengan anggota DPR lainnya," kata sosiolog Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, di Jakarta, Jumat (6/5).

Di sisi lain, bisa jadi kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri merupakan salah satu cara mengumpulkan uang. "Kita tidak pernah tahu pasti berapa besar biaya perjalanan dinas anggota DPR. Harusnya dibuka saja berapa besar biayanya," katanya. Menurut Imam, muncul kecurigaan di masyarakat bahwa ada faktor finansial yang harus diselidiki mengapa DPR selalu *ngotot* ke luar negeri.

"Bisa jadi orang itu pulang membawa lebih yang cukup signifikan. Saya menduga insentif ke luar negeri itu besar, atau bisa jadi ada dorongan untuk menyeter ke partai. *Income* anggota DPR itu kan juga ada yang diseter ke partai. Bisa jadi anggota DPR saat kampanye pencalonannya berutang, dan kesempatan ke luar negeri itu upaya membayar utang. Ini baru dugaan-dugaan dan harus kita selidiki," tutur Imam.

Secara terpisah, anggota Ko-

misi III DPR dan Badan Legislasi DPR, Ahmad Yani dari Partai Persatuan Pembangunan, menyatakan, terkait dengan masalah anggaran kunjungan kerja atau studi banding anggota DPR ke luar negeri, semuanya diurus Sekretariat Jenderal DPR.

"Setjen yang mengurus soal pesawat, hotel, mengontak pihak-pihak yang akan didatangi di luar negeri. Sebelum berangkat, kami rapat negara mana yang akan dikunjungi, mau ke mana saja, ketemu siapa saja," ujarnya.

Menurut Ahmad Yani, kelemahan DPR adalah seharusnya rencana kepergian anggota DPR tersebut dikomunikasikan kepada publik: mau ke mana, biayanya berapa, jadwalnya ke mana saja, harusnya dibuka ke publik.

"Studi banding atau kunjungan kerja dalam konteks tertentu masih diperlukan, misalnya, saat membahas UU Imigrasi kami studi banding ke Inggris karena sistem mereka paling bagus. Saya ikut, dan itu betul-betul kunjungan kerja. Di komisi saya tidak ada yang jalan-jalan. Kalau ada yang jalan-jalan, itu pelanggaran kode etik," kata Ahmad Yani.

Terkait dengan uang saku atau

insentif, menurut Ahmad Yani, besarnya sama dengan yang diterima pejabat eselon satu, sesuai dengan standardisasi Menteri Keuangan. "Uang sakunya standar, tidak mungkin ada uang lebih, apalagi untuk setor ke partai, sangat tidak mungkin itu. Lagi pula saya juga memilah-milah mana kunjungan kerja yang saya ingin ikuti atau tidak. Kalau saya rasa tidak perlu ikut, saya tidak ikut, seperti kunjungan Badan Legislasi ke Jerman, saya tidak ikut," tutur Ahmad Yani.

### Perencanaan lemah

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Jafar Hafshah di Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan, perencanaan yang lemah menyebabkan kunjungan kerja DPR umumnya kurang berjalan optimal. Efektivitas kunjungan kerja hanya dapat dicapai jika komisi menjalankan program yang telah disusun secara matang. "Selama ini banyak program kunjungan kerja yang sasarannya kurang tajam sehingga saya sering menegur anggota DPR dari Partai Demokrat," ungkap Jafar, Jumat.

Jafar juga menyayangkan bahwa pelaksanaan kunjungan kerja selama ini umumnya sekadar menghabiskan anggaran. Ia pun mendukung langkah pimpinan DPR untuk mengkaji ulang mekanisme kunjungan kerja. "Kalau perlu, jumlah kunjungan kerja ke luar negeri dibatasi," kata Jafar yang juga menjabat Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ini. (RIZ/LOK)



DK 0009 5273



Lihat Juga Video  
"Studi Banding DPR Di-  
protes" di [vod.kompas.com/protesdpr](http://vod.kompas.com/protesdpr)

# Alokasi Biaya Jadi Alasan Studi Banding DPR

“Seyogianya tak perlu studi banding.”

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ber-alasan studi banding ke luar negeri dilakukan karena biayanya sudah masuk anggaran. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan biaya yang telanjur dianggarkan menimbulkan dilema bagi lembaga legislatif. “Jadi, alasan itu yang digunakan,” kata Pramono, yang dua kali memimpin rapat koordinasi membahas studi banding, di Jakarta kemarin.

Dilema itu dikaitkan dengan sistem pertanggung-jawaban anggaran yang harus terserap. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, tak semua agenda studi

banding tidak bermanfaat. Ia mencontohkan studi banding tentang informasi geospasial dan kultural, yang undang-undangnya belum dimiliki Indonesia. Namun, untuk beberapa hal yang berkaitan dengan penyempurnaan undang-undang, Pramono setuju tak perlu studi banding. “Seyogianya tak perlu studi banding,” kata dia.

Kegiatan studi banding anggota DPR hampir selalu menuai kritik dan kecaman. Publik menganggap studi banding hanya menghamburkan uang rakyat tanpa menghasilkan produk legislasi yang bermanfaat bagi rakyat. Terkadang sejumlah anggota Dewan, bisa disebut, lebih banyak pelesir daripada melakukan kegiatan positif bagi

proses legislasi.

Sepanjang masa reses kali ini, DPR menyiapkan dana Rp 12 miliar untuk pergi ke luar negeri. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat 50 legislator bakal menuju empat benua dalam rentang waktu kurang dari sebulan. “Hanya dalam satu bulan, anggota DPR menghabiskan pajak Rp 12 miliar,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, Ahad lalu.

Fitra mencatat 11 anggota Komisi Luar Negeri akan berkunjung ke Turki, Rusia, Prancis, Spanyol, dan Amerika Serikat. Studi banding ke Turki menghabiskan dana Rp 879,91 juta, Rusia Rp 1,29 miliar, Pran-

cis Rp 944,59 juta, Spanyol Rp 1,2 miliar, serta Amerika Serikat Rp 1,41 miliar.

Adapun 13 anggota Komisi X pergi ke Spanyol dengan dana Rp 1,32 miliar, dari Cina dengan biaya Rp 668,73 juta. Sedangkan 13 anggota Komisi VIII juga pergi ke Cina dengan dana Rp 668,73 juta, dan Australia dengan biaya Rp 811,8 juta.

Badan Urusan Rumah Tangga DPR tak luput dari studi banding. Total dana yang dihabiskan ke Inggris sebesar Rp 1,57 miliar dan ke Amerika Serikat sebesar Rp 1,97 miliar. Data Fitra diolah dari Rencana Kerja DPR 2011, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DPR 2011, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2010.

● MAHARDIKA SATRIA HADI | PURWANTO

# Duta Besar Djoko Susilo Pertanyakan Sikap DPR

**JAKARTA** — Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Djoko Susilo, memilai reaksi sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kritiknya tentang kunjungan ke luar negeri berlebihan. "Saya heran kenapa teman saya Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR) bereaksi seperti itu," katanya saat dihubungi kemarin.

Djoko menegaskan, tujuan kritiknya bukan menghina atau melarang studi banding. Kritik dimaksudkan supaya kunjungan bisa lebih ma-

tang dan efektif. Dewan perlu memperhatikan jadwal kerja instansi yang dituju, sehingga kedutaan bisa menyesuaikan dengan jadwal instansi setempat.

Politikus Partai Amanat Nasional itu mencontohkan rombongan Dewan dari Sumatera pada tahun lalu. Para legislator itu mengirim surat sehari sebelum waktu kedatangan, yakni Jumat pukul 11.00 waktu Swiss.

"Mereka bilang hanya punya waktu hingga Jumat sore," kata

Djoko, yang mengaku sempat menolak menerima surat pertanggungjawaban mereka. "Padahal jadwal resminya selama enam hari. Sisanya mau jalan-jalan ke Kota Lucerne, bahkan ke Paris dan Amsterdam."

Djoko menegaskan, tak semua kunjungan buruk. Salah satu yang dipujinya adalah kunjungan Komisi Pertahanan DPR ke Turki. "Mereka bisa bertemu Presiden Turki, Menteri Pertahanan, anggota parlemen," ujarnya. "Itu kunjungan yang benar dan bermanfaat."

Para pelajar Indonesia di Australia memberi penilaian serupa. Mereka mengkritik rencana kunjungan Komisi VIII DPR ke Australia pada 26 April-2 Mei ini. "Kunjungan ke Australia lebih menyerupai kunjungan wisata dibanding tujuan awal kunjungan kerja," kata Ketua Perhimpunan Subkhan Zein.

Kedatangan para anggota Dewan yang hendak membahas Rancangan Undang-Undang Fakir Miskin ini juga dinilai bukan pada waktu yang tepat. Sebab, bertepatan dengan ma-

sa reses Paskah parlemen Australia serta parlemen Negara Bagian New South Wales dan Victoria. Mereka pun tak berencana melihat langsung penangan warga miskin di Sydney, Canberra, dan Melbourne.

Priyo mengangap Djoko kelewatan mengkritik Dewan. Ia merespons dengan "ancaman" menutup sejumlah kedutaan di luar negeri, setelah mengkaji ulang kaitan antara fungsi keberadaan kedutaan dan anggaran yang dikeluarkan.

● FEBRIYANI ANTARA

# LSM Desakkan Moratorium Studi Banding DPR

Laporan hasil kunjungan bermutu rendah.

**JAKARTA** — Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat mendesak Dewan Perwakilan Rakyat melakukan moratorium atau penghentian sementara studi banding ke luar negeri. Koalisi yang terdiri dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Centre (IBC), serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu menilai hasil kunjungan DPR selama ini tak maksimal.

"Dengan kata lain ini untuk mengurangi secara signifikan risiko ketidakefektifan studi banding," ujar anggota Koalisi, Abdullah Dahlan, di kantor ICW, Jakarta, kemarin.

Dahlan menerangkan, kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat sering tak bermanfaat bagi kinerja legislasi. Berdasarkan laporan studi banding, tak ada penjelasan secara terperinci kaitan antara temuan dan hasil studi banding serta capaian bagi substansi rancangan undang-undang. Dahlan mencontohkan, laporan Komisi Hukum DPR yang berangkat ke Swedia dan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Hortikultura ke Belanda pada periode 2004-2009.



Pegiat LSM dari ICW, Abdullah Dahlan (kiri), Roy Salam dari IBC, dan Ronald Rofiandri dari PSHK dalam jumpa pers di Jakarta kemarin. Mereka meminta moratorium studi banding DPR.

Ronald Rofiandi dari PSHK menuturkan, laporan kunjungan itu hanya terdiri atas satu lembar kertas. "Tak lebih dari sekadar deskripsi perjalanan," katanya. Demikian pula laporan Panitia Kerja Hortikultura.

Koalisi LSM juga mengkritik kunjungan Dewan ke Afrika Selatan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Pramuka, yang kini sudah disahkan. Kunjungan Badan Kehormatan ke Yunani untuk mempelajari etika parlemen juga dianggap tak perlu dilakukan. Apalagi laporan kegiatan kedua kegiatan itu sangat dangkal dari si-

si data dan informasi yang diperoleh. Laporan kunjungan itu, Dahlan menjelaskan, tak jauh berbeda dengan penjelasan di situs kepramukaan Afrika Selatan: [www.scouting.org.za/sasa](http://www.scouting.org.za/sasa).

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan menerima kritik Koalisi jika tujuannya untuk perbaikan. "Tapi, jika untuk mendikte dan menjatuhkan citra, kami punya pendirian sendiri," ujar politikus Partai Golongan Karya ini ketika dihubungi kemarin.

Menurut Priyo, Dewan memang berencana mengevaluasi studi banding ke luar

negeri. "Tanpa mereka minta, kami berencana membicarakan ini dengan para pimpinan fraksi dan komisi."

Menurut dia, DPR akan melakukan seleksi terhadap pembahasan undang-undang yang memang membutuhkan studi banding. Berdasarkan urgensinya, akan ditentukan apakah perlu dilakukan studi banding ke luar negeri.

● FEBRIYAN | SUKMA

# DPR Habiskan Dana Rp 15 Miliar

## DPR Nilai Kunjungan Kerja ke Luar Negeri Efektif

JAKARTA, KOMPAS — Sebulan terakhir ini Dewan Perwakilan Rakyat menghabiskan dana lebih dari Rp 15 miliar untuk membiayai kunjungan kerja ke beberapa negara. Selain pemborosan, kunjungan kerja itu tak akan efektif untuk menghasilkan rancangan undang-undang yang berkualitas.

Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), sejak April hingga Rabu (4/5), Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan 14 kegiatan kunjungan kerja. Komisi I DPR mengunjungi lima negara, yakni Amerika Serikat, Turki, Rusia, Perancis, dan Spanyol.

Komisi X berkunjung ke Spanyol dan China, Komisi VIII ke China dan Australia, Komisi III ke Jerman, serta Komisi II ke India. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) juga melakukan kunjungan kerja ke Inggris dan Amerika Serikat. Rombongan Ketua DPR Marzuki Alie, melawat ke Irak untuk menjajaki kerja sama bidang energi.

Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Fitra Uchok Sky Khadafi, total dana kunjungan kerja selama satu bulan terakhir mencapai Rp 15,024 miliar. Dia menilai anggota DPR melakukan perlawanan kepada masyarakat. Pasalnya, DPR tidak mendengarkan masyarakat yang kerap menyarankan agar mereka tak perlu ke luar negeri.

Menurut Erik Kurniawan dari

### Biaya Kunjungan Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2011

Total Biaya Rp 15.024.971.250

1 Kunjungan ke AS (1-7 Mei 2011)	Rp 1.405.548.500
2 Kunjungan ke Turki (16-22 April 2011)	Rp 879.908.000
3 Kunjungan ke Rusia	Rp 1.286.713.750
4 Kunjungan ke Perancis (14-20 April 2011)	Rp 944.593.250
5 Kunjungan ke Spanyol	Rp 1.201.826.500
6 Kunjungan ke Spanyol (24-30 April 2011)	Rp 1.320.374.500
7 Kunjungan ke China	Rp 668.730.500
8 Kunjungan ke China (17-24 April 2011)	Rp 668.730.500
9 Kunjungan ke Australia	Rp 811.800.250
10 Kunjungan ke Inggris (1-7 Mei 2011)	Rp 1.574.638.500
11 Kunjungan ke AS	Rp 1.966.986.500
12 Kunjungan ke Irak (1-6 Mei 2011)	Rp 618.993.250
13 Kunjungan ke Jerman (25 April-1 Mei)	Rp 1.222.130.250
14 Kunjungan ke India (3-7 Mei)	Rp 453.760.500

Sumber: Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra)

FOTO: KOMPAS/YUNIADHILAGUNG; GRAFIK: ANDRI

Indonesia Parliamentary Center (IPC), kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPR tidak efektif karena waktunya terlalu singkat. Sebenarnya, DPR bisa meminta data atau dokumen dengan berkorespondensi kepada pemerintah atau parlemen negara yang dirujuk atau mencari data melalui internet. Metode ini lebih murah dan hasilnya pun tidak jauh berbeda.

Namun, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menegaskan, kunjungan kerja ke luar negeri tetap efektif. Setiap anggota DPR dapat melakukan perbandingan langsung kebijakan yang diterapkan di luar negeri dengan kondisi di dalam negeri. "Kunjungan kerja ini sangat efektif. Tergantung pengaturannya. Kalau kami di

India, pengaturan kedubes cukup baik. Kami bertemu banyak lembaga. Acaranya juga padat sekali," tuturnya. Saat ini 10 anggota Komisi II berada di India.

Duta Besar Indonesia untuk India Andi M Ghalib juga mengakui, kunjungan kerja Komisi II ke India termasuk efektif dan efisien. Jadwal kunjungan kerja selama empat hari padat. Selain bertemu dengan perwakilan pemerintah dan parlemen, Komisi II juga mengunjungi daerah perbatasan India-Pakistan.

Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh menjelaskan, tahun ini anggaran kunjungan kerja untuk pembahasan satu RUU ditetapkan Rp 1,7 miliar. Total anggaran kunjungan kerja selama 2011 mencapai lebih dari Rp 100 miliar. (NTA)



DK 0009 5267

# Biaya RUU Kemahalan

## Tidak Akan Mendorong Peningkatan Kualitas

JAKARTA, KOMPAS — Usulan anggaran pembuatan rancangan undang-undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp 8,47 miliar dinilai terlalu mahal. Selain pemborosan, kenaikan anggaran juga tidak akan mendorong peningkatan kualitas proses dan substansi RUU yang dihasilkan.

Usulan kenaikan biaya pembuatan satu RUU dari Rp 6,8 miliar menjadi Rp 8,47 miliar pada tahun 2012 dipertanyakan Kepala Kelompok Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Badan Legislasi DPR Arif Wibowo, Selasa (3/5). "Kok ada usulan anggaran sebesar itu? Dulu hanya Rp 5 miliar, itu pun tidak seluruhnya bisa digunakan," katanya.

Menurut Arif, penggunaan anggaran diatur dan dikelola Sekretariat Jenderal DPR. Anggota DPR sama sekali tidak mengetahui pengelolaan anggaran yang dilakukan Sekretariat Jenderal.

Anggaran pembuatan RUU memang diusulkan naik karena DPR merasa perlu meningkatkan

Menurut Arif, anggaran Rp 4 miliar cukup untuk membiayai pembuatan satu RUU.

### Tak berpengaruh

Secara terpisah, Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiahandi mengatakan, anggaran pembuatan RUU memang selalu naik setiap tahun. Padahal, peningkatan anggaran tidak menjamin peningkatan kualitas pembuatan dan substansi RUU.

"Usulan peningkatan anggaran bukanlah solusi untuk menyelesaikan problem legislasi. Itu malah terlihat menyederhanakan problem legislasi yang sebetulnya sangat kompleks," ujarnya.

Meskipun terus mengalami kenaikan, capaian kinerja legislasi DPR setiap tahun tetap buruk. Tahun 2010, misalnya, DPR hanya dapat menyelesaikan delapan UU dari target 70 UU. Hal itu menunjukkan tidak ada korelasi antara kenaikan anggaran dan kinerja legislasi.

Menurut Ronald, hal yang ha-

rus dikedepankan adalah penataan ulang perencanaan legislasi. Jika kenaikan anggaran tak disertai dengan penataan ulang perencanaan legislasi, DPR akan tetap sulit mencapai target legislasi dan membuat RUU yang berkualitas.

Hasil rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan pimpinan Badan Anggaran memang mengusulkan kenaikan anggaran pembuatan satu RUU inisiatif DPR hingga Rp 8,47 miliar.

Menurut anggota BURT dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, M Arwani Thomafi, Senin, kenaikan anggaran itu masih berupa usulan. "Masih panjang pembahasannya, masih harus dibahas di BURT, lalu dibahas dengan Banggar dan disetujui di paripurna sebagai usulan DPR, kemudian dibahas bersama pemerintah," tuturnya.

Usulan anggaran Rp 8,47 miliar itu, ujar Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono, baru ancar-ancar. (NTA)

# Komisi I DPR Berhamburan ke Luar Negeri

ANGGOTA Komisi I DPR berhamburan ke luar negeri. Mereka mengaku studi banding ke empat negara untuk mengisi masa reses. Keempat negara yang menjadi tujuan itu ialah Prancis, Rusia, Turki, dan AS.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo menyatakan studi banding itu untuk mempelajari industri alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Kunjungan ini sudah teragenda," ujarnya ketika dihubungi *Media Indonesia* tadi malam. Ia mengaku masuk tim yang berkunjung ke Prancis.

Kunjungan itu diawali ke Italia. Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin sudah berangkat ke-

marin. Kemudian, tim berikutnya akan terbang ke Turki dan kemudian ke Rusia pada Sabtu (16/4). Adapun kunjungan ke AS, rencananya dilaksanakan pada awal bulan depan. Setiap kunjungan itu dijadwalkan selama satu minggu.

"Kalau tidak salah, ketua tim yang ke Rusia dan Turki di antara Agus Gumiwang Kartasasmita atau Mahtudz Siddiq. Sedangkan untuk ke AS dipimpin Hayono Isman," ungkapnya.

Anggota Komisi I lainnya, Helmi Fauzi dari Fraksi PDIP, menyatakan setiap tim kunjungan kerja berangkat dengan sembilan anggota DPR, termasuk ketua tim.

Koordinator Investigasi dan Ad-

Selain itu, lanjutnya, semestinya DPR juga menuntaskan polemik pembangunan gedung DPR yang ditolak rakyat.

Sementara itu, menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sekjen DPR telah menaikkan biaya kunjungan ke luar negeri anggota DPR dalam anggaran 2012 sebesar Rp3,4 miliar. Angka itu naik sekitar dua kali lipat dari anggaran pada 2011 sebesar Rp1,7 miliar.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan kenaikan biaya ke luar negeri itu merupakan keputusan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang di dalamnya ada perwakilan fraksi-fraksi di DPR. (AO/\* /X-5)



MU SUJARYANTO

## Roy Suryo

Anggota Komisi I DPR

vokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menyayangkan studi banding tersebut. Seharusnya, katanya, untuk mengisi masa reses, anggota DPR berkuat dengan konstituen.

## Pelesir Anggota DPR Telan Rp4,5 Miliar

KUNJUNGAN kerja anggota Komisi I DPR ke empat negara dalam masa reses saat ini diperkirakan menghabiskan uang rakyat Rp4,5 miliar. Keempat negara itu Prancis, Rusia, Turki, dan Amerika Serikat (*Media Indonesia*, 14/4).

Menurut kalkulasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), biaya ke Prancis Rp944,59 juta, ke Rusia Rp1,28 miliar, ke Turki Rp879,9 juta, dan ke AS Rp1,4 miliar.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi menyatakan kunjungan kerja itu merupakan pemborosan. Apalagi rencana kunjungan dan besaran anggarannya tidak diumumkan secara resmi.

"Seharusnya anggaran itu untuk program-program masyarakat miskin, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri yang hanya untuk mencari kesenangan pribadi," ujarnya, kemarin.

Uchok menambahkan semestinya selama masa reses anggota DPR mengunjungi konstituen mereka. "Mereka lepas diri dari tanggung jawab kepada konstituen. Konstituen dibutuhkan saat-saat pemilu saja."

Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq membenarkan anggota komisi yang dipimpinnya mengadakan

kunjungan kerja ke sejumlah negara dalam masa reses ini untuk kepentingan legislasi.

Dia menjelaskan kunjungan kerja itu untuk menggali masukan tentang industri pertahanan, kebijakan politik terkait isu-isu di berbagai negara, sekaligus bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang Intelijen.

"Setiap kelompok rata-rata terdiri dari 10 orang. Saya sendiri ke Turki pada Senin (18/4)," paparnya. Menurutnya, para anggota diperbolehkan membawa istri atau keluarga masing-masing asalkan dengan biaya sendiri.

Mengenai anggaran, Mahfudz mengaku hal itu sesuai dengan standar. "Tiket pesawat masih kelas bisnis. Detailnya, tanyakan sekretariat."

Ketika ditanyakan ke Sekretariat Komisi I dan Sekretariat Jenderal DPR, mereka tidak dapat memberi penjelasan. Menurut data Setjen DPR, pagu anggaran kunjungan kerja Komisi I pada 2011 sebesar Rp5,1 miliar.

Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan kunjungan kerja itu direncanakan sejak 2010. Keberangkatan rombongan, menurutnya, bergantung kesiapan negara tujuan. (NA/X-5)